



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, DIRUT PT GARAM
(PERSERO), DIRUT PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO), DAN
DIRUT PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA/HOLDING PANGAN
ID FOOD**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Senin, 12 Juni 2023
Waktu : Pukul 10.30 s. d 13.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : 1. RKA dan RKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; serta
3. Isu-isu aktual Lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI
36 dari 52 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 - 3) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 - 4) Drs. I Made Urip, M.Si.
 - 5) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
 - 6) Vita Ervina, S.E., M.B.A.
 - 7) Maria Lestari, S.Pd.
 - 8) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.
 - 9) M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.

2. Fraksi Partai Golongan Karya
5 dari 8 orang Anggota
 - 1) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 2) Firman Soebayo, S.E., M.H.
 - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 4) Alien Mus
 - 5) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
 - 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 - 3) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 - 4) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 - 5) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari,
DESS., M.Sc.
 - 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) H. Sulaeman L. Hamzah
 - 2) Ir. Abdullah Tuasikal
 - 3) Julie Sutrisno
 - 4) Yessy Melania, S.E.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) Dr. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Daniel Johan, S.E., M.M.
 - 3) Drs. H. Ibnu Multazam
 - 4) Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat
2 dari 5 orang Anggota
 - 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
 - 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3 dari 5 orang Anggota
 - 1) Drh. H. Slamet
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 - 3) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 orang Anggota
 - 1) Haerudin, S.Ag., M.H.
 - 2) Ir. Alimin Abdullah

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
1 dari 2 orang Anggota
1) Ema Umriyatul Chusnah

- B. Anggota Izin
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1) H. Sunarna, S.E., M. Hum.

- Fraksi Partai Golongan Karya
1) Ir. Panggah Susanto, M.M.

- Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
1) Ir. Dwita Ria Gunadi

- Fraksi Partai Demokrat
1) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.

- C. Pemerintah
1. Menteri Kelautan dan Perikanan (Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.);
 2. Sekretaris Jenderal (Drs. Antam Novambar, S.H., M.Hum.);
 3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc.);
 4. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.);
 5. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.);
 6. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dr. Budi Sulistiyo, M.Si.);
 7. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.);
 8. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc.);
 9. Plt. Inspektur Jenderal (Ir. Teuku Nilwan, M.M.);
 10. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si.);
 11. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food (Frans Marganda Tambunan);
 12. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Sigit Muhartono); dan
 13. Direktur Operasi dan Pengembangan PT Garam (Persero) (F. Purwanto).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

(suara tidak terekam) pada substansinya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, rapat kerja ini kami buka dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 13.30 WIB. Perlu saya ingatkan karena setelah ini pukul 14.00 WIB kita akan ada Rapat Kerja juga dengan Kementerian LHK karena besok dengan Menteri Pertanian, malamnya sudah harus masuk semua ke Badan Anggaran. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap acara hari ini;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(KETUK PALU 1 KALI)

Sebagaimana yang kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib dan akan mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah atau RKP serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga/RKA-KL dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan pemerintah.

Selanjutnya, hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja hari ini adalah berdasarkan Surat Badan Anggaran Nomor B/6570/AG.01.02/05.2023 tanggal 30 Mei mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 sebagai acuan dalam rangka

pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024 dan RKP tahun 2024 antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

Dapat kita ketahui pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi masa kini dengan tanpa mengorbankan generasi muda. Kesejahteraan merupakan urgensi utama dan tujuan akhir dalam sebuah program dan kegiatan tentunya dengan menerapkan tiga dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi. Pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan pada dasarnya merupakan strategi untuk mengintegrasikan mengumpulkan berbagai potensi sumber daya alam kelautan perikanan Indonesia untuk dikelola sebaik-baiknya. Dalam RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan empat *mainstreaming* bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, menjadi katalis Pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu dari keempat *mainstreaming*. Hal ini penting karena pelaksanaan agenda pembangunan prioritas nasional khususnya proyek prioritas strategis yang bersifat *major project* menjadi konkret dalam penyelesaiannya sebagai isu aktual agar arah pembangunan dapat terukur dan nilai manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat. Untuk itu, Komisi IV mengingatkan kepada Kementerian Kelautan Perikanan untuk melakukan antisipasi adanya isu-isu aktual yang berkembang, ketidakpastian ekonomi, iklim politik di Indonesia yang berdampak pada masyarakat, fakta resiko besar ke depan dari catatan di atas harus diwaspadai ini dan dicarikan solusi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Berkaitan dengan pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2024 sebagai Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-292/M.PPN/D.8/PP.0402/042023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287MK.022023 ditetapkan sebagai 6,9 triliun. Jadi, kalau 6,9 triliun ini yang saya khawatirkan hari raya pengawasan PSDKP-nya buka 90 hari lagi jadi 60 hari lagi *nih*. Nanti saya minta persetujuan teman-teman, kita usulkan saja dinaikkan 2 triliun atau 2,5 triliun karena dulu pernah mencapai hampir 13 triliun lebih, ya kan? Yang pertama adalah untuk perbaikan-perbaikan pelabuhan kapal. Di tempat saya itu, *Alhamdulillah* dari jamannya Pak Fadel sampai sekarang belum ada perbaikan. Saya usulkan dari yang zamannya Dedi jadi Drijen Tangkap paling dapatnya 1 miliar. Bangun *break water* 1 miliar sudah jadi, tahun depannya hilang, tahun ketiganya dapat lagi 1 miliar lagi. Jadi sampai kiamat pun itu *enggak* bakal terjadi, *enggak* bakal selesai.

Komisi IV ingin meminta kejelasan sejauhmana program kegiatan yang bersifat pemulihan ekonomi terutama yang bersentuhan dengan masyarakat kecil tetap ada dan jika memungkinkan program-program kegiatannya ditambah mengingat dampaknya bisa langsung dirasakan oleh rakyat yang mana tahun 2023 6,29 triliun. Selanjutnya, Komisi IV meminta penjelasan terkait adanya isu-isu aktual yang muncul di Masyarakat, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, bagaimana proses regulasinya.

Yang kedua, perlu adanya pembenahan penyuluh terhadap tata kelola perikanan nasional khususnya terhadap perizinan kapal perikanan yang dimaksud adalah kejelasan kewenangan pusat dan daerah dan perlu adanya peningkatan pembangunan kampung nelayan maju atau yang lebih dikenal dengan nama Kalaju yang mampu dirasakan oleh masyarakat pesisir alokasi anggarannya ditambah. Jadi, teman-teman mungkin yang punya pesisir minta Kalajunya ditambah tetapi juga teman-teman di Banggar juga mendapatkan tugas ini untuk meminta tambahan alokasi dari 6,9 triliun kalau perlu menjadi 10 triliun. Mengingat infrastruktur Kalaju merupakan modal dasar ekonomi nelayan tumbuh, tidak adanya laporan kepada Komisi IV sehingga hari ini KKP terkait rancangan peraturan Presiden tentang Badan Karantina Indonesia. Ini kan baru dikeluarkan PP-nya dan saya juga minta kalau perlu pendalaman secara FGD karena ini sudah cukup lama dibuatnya undang-undang tersebut. Satu sisi waktu itu Kementerian Pertanian sudah oke, Kementerian Kelautan juga sudah oke, ya. Dengan adanya PP ini mudah-mudahan segera dibentuk Badan Karantina Nasional. Adanya dugaan praktik jual beli jabatan di tubuh Badan Karantina KKP, ini jangan sampai terjadi karena ini mencoreng lembaga negara dan mitra kerja Komisi IV. Jadi, nanti tolong dijelaskan isu ini darimana dan saya juga nggak pernah dengar masalah ini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar yang disampaikan.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan agenda rapat hari ini. Saya persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir disini,

Puji Syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI.

Sesuai agenda rapat kerja hari ini, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Tema rencana kerja pemerintah tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah arah kebijakan nasional pada tahun 2024 mencakup pengurangan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pelaksanaan pemilu 2024.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan Jakarta jangka menengah nasional 2020-2024, rencana kerja pemerintah 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan 7 prioritas nasional. Ketujuh prioritas nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung tema dan anggaran kebijakan pemerintah tahun 2024, KKP mengimplementasikan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan ekonomi biru agar laut tetap sehat dan populasi ikan serta jasa lingkungan lainnya terjaga dengan baik yaitu melalui perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Target indikator kinerja terutama KKP dalam rencana kerja pemerintah tahun 2024 antara lain pertumbuhan PDB perikanan sebesar 5 sampai 6%, produksi perikanan sebesar 30,85 juta ton, produksi garam sebesar 2 juta ton, angka konsumsi ikan meningkat 59 kilogram per kapita per tahun, ekspor hasil perikanan diharapkan mencapai 7,2 miliar Dolar, nilai tukar nelayan sebesar 108, nilai tukar pembudidaya ikan sebesar 105, luas kawasan konservasi seluas 29,3 juta hektar. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.292/M.PPM/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian dan Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024, KKP mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 6,9 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar 6,3 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp145,8 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp300 juta, rupiah murni pendamping sebesar Rp2 miliar, PNBP sebesar 393,74 miliar, BLU sebesar 59,51 miliar.

Dalam rangka kerja pemerintah tahun 2024, alokasi anggaran KKP untuk mendukung prioritas nasional sebesar 2,89 triliun yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sebesar

1,87 triliun, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebesar 26,5 miliar, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing sebesar 229 miliar, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar 3 miliar, mengembangkan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar 127 miliar, dan memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transportasi pelayanan publik sebesar 641,5 miliar.

Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Rancangan pagu indikatif KKP tahun 2024 berdasarkan jenis belanja terdiri dari belanja operasional sebesar 2,9 triliun dan belanja non operasional sebesar 3,9 triliun. Rancangan pagu indikatif KKP tahun 2024 berdasarkan program yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar 2,44 triliun, program nilai tambah saing dan industri sebesar Rp165,6 miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar 103,6 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp372,29 miliar, program dukungan manajemen sebesar Rp3,8 triliun. Rancangan pagu indikatif KKP tahun 2024 berdasarkan unit kerja Eselon I yaitu Sekjen sebesar 657,22 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp86,29 miliar, Dirjen Perikanan Tangkap sebesar Rp915,67 miliar, Dirjen Perikanan Budidaya sebesar Rp1,1 triliun, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,07 triliun, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp358,6 miliar, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp654,36 miliar, Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan sebesar 1,45 triliun, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp521,47 miliar.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Rancangan kegiatan prioritas KKP tahun 2024 antara lain perikanan tangkap adalah untuk implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota melalui penyusunan alokasi sumber daya ikan, alokasi usaha, dan kuota, integrasi sistem perizinan pusat dan daerah. Selain itu, penataan kampung nelayan maju juga menjadi prioritas, pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi, korporasi nelayan, kegiatan bakti nelayan, dan batuan alat sarana penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, dan Bimtek untuk nelayan kepelabuhanan perikanan. Perikanan budidaya, pembangunan kawasan tambak udang, revitalisasi tambak, pengembangan *broodstock center*, pengembangan korporasi pembudidaya ikan, bantuan sarana prasarana produksi seperti benih dan calon induk, pupuk, kebun dan bibit rumput laut, dan ekskavator keramba jaring apung, pengelolaan irigasi tambak partisipatif dan Bimtek perikanan budidaya.

Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain pembangunan pasar ikan, kampanye gemar ikan, pembangunan logistik rantai dingin, pengembangan usaha dan investasi bantuan kelautan pemasaran, pengolahan ikan kendaraan pemasaran, Bimtek kewirausahaan dan promosi produk kelautan dan perikanan. Pengolahan ruang laut antara lain untuk pengelolaan kawasan konservasi, penyusunan aplikasi *ocean accounting*, penyelesaian penataan ruang laut, penyelenggaraan perizinan sesuai

pemanfaatan ruang laut, penggelaran bulan cinta laut, rehabilitasi mangrove, sarana dan prasarana pesisir pulau-pulau kecil, fasilitasi perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat, bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi dan lingkungan hidup produktif untuk masyarakat pesisir.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain untuk pengawasan penangkapan ikan terukur melalui operasi kapal pengawas, pesawat patroli dan *speed boat* pengawas, perawatan armada pengawasan, *speed boat* pengawasan dan prasarana pengawasan, pengawasan terhadap kepatuhan usaha, pembinaan dan Bimtek pengawasan untuk kelompok masyarakat pengawas.

Pengembangan SDM antara lain untuk menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat kelautan dan perikanan, pembangunan *smart fisheries village*, penyuluhan dan pendidikan Bimtek untuk masyarakat dan pendidikan vokasi untuk anak pelaku utama. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil utama perikanan antara lain sertifikasi sertifikat karantina dan HCCP, Sarpras karantina dan pengujian mutu, pengawasan mutu hasil perikanan, *monitoring* residu dan bahan berbahaya dan bulan bakti karantina.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Kami sangat optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan dengan selalu menjadikan ekologis bagi panglima, dapat menciptakan laut yang sehat, menjadi sumber ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, sehingga perlu percepatan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk itu, KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp714,44 miliar yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2024 sehingga usulan pagu anggaran KKP tahun 2024 menjadi 7,62 triliun. Adapun rincian usulan tambahan anggaran sebagaimana tertera dalam bahan yang telah kami sampaikan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja kali ini. Kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI terhadap usulan rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2024. Seluruh saran, usulan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2024.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh.*

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Pimpinan.

Om Shanti Shanti Shanti om.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV DPR RI untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya.

Ada apa Mba Kiky? Silakan.

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Sebentar saja Pimpinan, saya lihat ada beberapa muka baru gitu. Takutnya kita nggak kenal ya.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Oh ya, Mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Oke, dijelaskan dulu. Yang merasa baru ngomong saja.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Yang pertama, saya ucapkan selamat dulu atas gelar barunya sebagai Doktor. Saya kirim bunga loh waktu itu, saya kirim bunga. Luar biasa.

Baik, terima kasih.

Saya lupa memperkenalkan, saya juga ada lihat anggota baru disini, ini sahabat saya Pak Ihsan, terima kasih, Pak.

Yang pertama, Pak Agus Suherman adalah... silakan berdiri Pak Agus Suherman, orang lama juga sebetulnya, orang lama dan aslinya dari tempatnya Pak Sudin. Beliau sebagai staf ahli dan sekarang menjabat sebagai Plt. Dirjen Tangkap, karena Dirjen Tangkap yang lama sudah pensiun. Lampung tuh dekat dengan Palembang juga. Yang kedua, Dirjen Daya Saing, silakan berdiri Pak Budi, ini orang lama juga sebetulnya naik jadi yang baru. Enggak ada lagi ya? Yang berikutnya adalah Kepala Biro Perencanaannya baru, Pak Andi, ini dari Jambi, kita tarik ke pusat. Lalu kemudian, staf ahli Ibu Is yang dulu sebagai Karoren, sekarang kita naikan sebagai staf ahli.

Demikian.

Terima kasih, Ibu Doktor. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Cuma tadi Pak Budi barusan bilang sebelum beliau meninggalkan, saya agak kecewa juga katanya *kok* yang dibilang sahabat cuma Ihsan *doang* yang lain nggak.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sama, kita juga kecewa, kita sudah lama padahal tapi *enggak* dibilang sahabat. Kalau rapat kita bikin cepat-cepat...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mohon maaf Ibu, mohon maaf.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Padahal ya, Pak Ihsan baru saja ketemu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ini sebelum jadi Menteri, sudah...

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tuh kan begitu, apapun lah cerita dibalik sebelumnya bikin kita cemburu yang jelas, Pak Ihsan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Semua sahabat, pokoknya.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Bapak-Ibu yang saya hormati,

Terima kasih Pak Menteri atas semua paparannya.

Saya persilakan Bapak-Ibu Anggota untuk memberikan tanggapannya,

Pak Azikin Solthan yang pertama. Silakan Pak Azikin.

F-P. GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo budhhaya,
Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta rombongan
yang kami hormati,

Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan pagu indikatif tahun 2023 sebesar 6,104 triliun dengan pagu indikatif tahun 2024 sebesar 6,905 triliun, artinya ada peningkatan anggaran KKP dari tahun 2024 sebesar 801 miliar. Dengan pagu anggaran tersebut, kami meminta KKP untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sasaran dan target program tahun 2024 tercapai diantaranya target pertumbuhan PDB perikanan sebesar 5% sampai dengan 6%. Kemudian, menstabilkan dan meningkatkan nilai tukar nelayan pada kisaran 108 dan nilai tukar budidaya ikan pada kisaran 105. Selain itu, kami mendukung usulan tambahan pagu anggaran tahun 2024 sebesar 714,4 miliar sehingga secara keseluruhan menjadi 7,619 triliun yang kami anggap wajar dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedua, kami menanyakan kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut karena regulasi ini mencabut Kepres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Selain itu, PP ini juga otomatis mencabut Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 177 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Mencabut juga SKB 3 Menteri yaitu Menteri LHK, Menteri Perdagangan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghentian Ekspor Pasir Laut Tahun 2022. Para nelayan, masyarakat pesisir dan pemerhati lingkungan hidup sangat resah dan khawatir sebab kebijakan tersebut disinyalir akan melegalkan tambang pasir laut di semua tempat di Indonesia. Dalam jangka panjang hal ini akan berdampak serius pada krisis ekologis di wilayah pesisir dan laut. Juga kerusakan ekosistem biota laut yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan para nelayan, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 tersebut serta agar meminta PP ini dapat ditinjau kembali dengan meminta masukan dari para pihak pemangku kepentingan.

Tiga, kami mendorong agar anggaran prioritas nasional, satu PN1 KKP yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan sebesar 1,86 triliun dengan menu anggaran yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat nelayan, pembudidaya, petambak garam, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat direalisasikan sesuai rencana terutama program bantuan langsung kepada kelompok masyarakat.

Keempat, kami mendukung pelaksanaan program fasilitas sertifikasi hak atas tanah nelayan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk 10.000 orang. Namun, kami meminta penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan program tersebut.

Lima, dalam usulan rancangan kegiatan prioritas nasional tahun 2024, Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya menetapkan 2 lokasi dalam melaksanakan gerakan bersih sampah plastik di sentra perikanan budidaya laut. Kami meminta penjelasan sejauhmana gerakan bersih sampah plastik dapat mengurangi limbah plastik di laut perairan Indonesia. Kami mendorong KKP untuk bekerja sama dengan KLHK mengkombinasikan program tersebut dengan program bank sampah. Selain itu, diperlukan sinergitas dengan kementerian lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya. Dengan kata lain, melaksanakan koordinasi integrisasi dan sinkronisasi dengan semua *stakeholder* yang terkait.

Pada usulan rancangan kegiatan prioritas nasional tahun 2024, Direktorat Jenderal PSDKP telah menganggarkan operasi pengawasan selama 290 hari dengan rincian pengawasan penggunaan kapal pengawas selama 70 hari, pesawat selama 170 hari, dan *speed boat* selama 50 hari. Selain itu, PSDKP meminta penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari. Artinya, ada 350 hari kerja pengawasan, sementara 1 tahun ada 365 hari. Artinya, 15 hari laut kita tidak terawasi. Kami meminta penjelasan mengenai hal tersebut dan kami mendorong Direktorat Jenderal PSDKP untuk menganggarkan operasi pengawasan selama 1 tahun penuh.

Tujuh, kegiatan bimbingan teknis/Bimtek yang diberikan kepada Pokmaswas di lapangan cukup mendapatkan perhatian yang baik terutama dari masyarakat kelautan perikanan, dimana Pokmaswas dibentuk untuk membantu tugas pemerintah daerah sampai ke wilayah pesisir seluruh Indonesia. Dalam prioritas nasional tahun 2024, PSDKP merencanakan terbentuknya 1.110 kelompok yang dibina guna membantu pengawasan SDKP untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi Pokmaswas. Kami meminta KKP untuk meningkatkan anggaran kegiatan Pokmaswas berupa sarana pendukung bagi anggota masyarakat kelautan perikanan seperti papan plang informasi peraturan dan larangan, alat bantu informasi serta program kegiatan Pokmaswas yang berdampak pada lebih dikenalnya Pokmaswas oleh masyarakat.

Selanjutnya, terkait rencana kegiatan prioritas Dirjen PRL, kami meminta penjelasan tentang 29,3 juta hektar luas kawasan konservasi dan 17,89 juta hektar pengelolaan efektif kawasan konservasi. Kami menanyakan tentang

pada kawasan tersebut tersebar di wilayah mana saja. Kami menanyakan efektivitas pembangunan *washing plant* garam yang telah dilaksanakan KKP terhadap upaya pemenuhan standar kadar NaCL/Natrium Clorida garam industri dalam negeri.

Selanjutnya, berdasarkan neraca garam nasional tahun 2022, bahwa PT Garam hanya mampu memproduksi 180 ton per tahun. Adapun petambak garam kita memproduksi 912.092 ton. Berdasarkan data tersebut, sebenarnya kita sudah bisa swasembada garam konsumsi nasional sebesar 745.656 ton. Terakhir, kami mengingatkan badan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri, begitu juga sebaliknya dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar 521,46 miliar. Kami berharap agar pengawasan dan pengendalian terhadap mutu dan kualitas ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke negara tujuan tetap dapat terjaga.

Demikian catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Indonesia Raya.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih, Pak Azikin.

Selanjutnya, Ibu Doktor Riezky Aprilia.

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Terima kasih Ibu Doktor Anggia. *Ntar* kasih resep ya.

Selamat siang kepada KKP,

Saya langsung saja. Di paparan, saya mencoba menggali terkait halaman 9 itu di perikanan tangkap, makanya kenapa saya cari Pak Zaini ternyata saya pikir Pak Zaini rambutnya sudah tumbuh ternyata ganti orang ya. Jadi, halaman 9 itu saya ingin memastikan mengenai penataan kampung nelayan maju. Saya tidak tahu tapi yang pasti saya alami sendiri Kalaju ini 2 tahun sempat tidak jalan, jangan sampai ditulis tapi *enggak* jalan lagi. Boleh ditanya di wilayah teman masing-masing. Jadi, kita berharap anggaran ini benar-benar bisa tepat guna, tepat sasaran. Jangan dijadikan kembang-kembang paparan walaupun saya harus apresiasi, Pak Menteri, baru ini saya lihat Pak Menteri paparannya Kelautan dan Perikanan ini *easy to read*, gampang dibaca. Biasanya kita nebak ini gambar pohon kelapa kemana ya? ini... ini... ini gitu. Saya apresiasi lah itu. Itu pertama ya Pak Dirjen yang baru.

Kemudian, perikanan budidaya Pak TB Heru masih kan, oh ya? Udah tumbuh dikit rambutnya, Pak. Halaman 10 itu, ini ada yang baru dan saya mohon penjelasannya, 500 unit bantuan pupuk untuk usaha budidaya. Apakah ini ada kaitanya dengan perdebatan permasalahan kita kemarin pupuk yang sudah bergeser, punya KKP punya KKP, atau seperti apa? Saya mohon penjelasannya.

Kemudian, di halaman 11 *nah* ini PDS. Saya dari awal itu mempertanyakan terkait pasar ikan. Pasar ikan ini apakah tepat sasaran, Pak? Saya ambil contoh saja, *enggak* usah jauh-jauh *lah*, di Sumatera Selatan, boleh ditanya sama Pak Mahmud namanya, *enggak* tahu Pak Mahmudnya mana, *tuh*. Gimana saya teriak-teriaknya kayak apa dan terbukti ya Pak Mahmud ya omongan saya, benar *enggak* ya? Bahwa *supposed to be* pasar ikan ini dekat *dong* dengan lokasi. Saya ingin memastikan titiknya dimana aja? Jangan sampai pasar ikan atau sentra kuliner ikan ini malah berjauhan, malah *enggak* ada, akhirnya malah jadi pasar apa *lah* terserah. Saya *enggak* mau negara menghabiskan uang buat yang *enggak* penting gitu.

Kemudian, ada lagi satu paket bursa pasar ikan. Jadi, mohon pencerahannya, Pak. Dari dulu saya mengkritisi PDS itu hobi banget bikin perintilan-perintilan, padahal intinya sama, gitu. *Nah*, kemudian 100 UMKM fasilitasi dan pendampingan UMKM di bawahnya 550 UMKM fasilitasi akses pembiayaan program kredit UMKM KP. 875... saya sepakat Pak, UMKM ini akan tetapi pendampingannya seperti apa? Bukan hanya penyuluhan saja, pendampingan yang paling penting, hilirisasinya mau seperti apa? Jadi, saya harap PDS itu program *kayak gini sih* kita semua senang karena itu membangkitkan gairah ekonomi kerakyatan kan gitu, tapi jangan sampai kembali lagi, kembangnya aja layu sebelum berkembang, *enggak* enak, Pak.

Kemudian, *nah* ini tadi yang mungkin pengelolaan ruang laut. Pengelolaan ruang laut ini saya *enggak* tahu ada *enggak* relevansinya PP 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Saya harap Pak Dirjen ini linear dengan kebijakan ekonomi biru poin1 yang ada di halaman 1 dan kemudian juga di penjelasan masalah program prioritas nasional di halaman 5 PN6. Kenapa? Saya hanya mengingatkan, sekarang Komisi IV sedang memfinalisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang KSDAHE. Saya harap tidak kontra produktif dengan apa yang sudah dipikirkan oleh teman-teman serius ini. Kalau memang ternyata kontra produktif, harus dipilih tidak mungkin kita membuat undang-undang tapi kontra dengan apa yang dilakukan eksekutif karena itu juga undang-undang itu marwahnya DPR.

Kemudian, terakhir yang tadi Pak Ketua sampaikan masalah BKIPM. BKIPM yang mana *sih*? Oh Ibu, ya? Kita pernah diskusi Ibu. Pertanyaan saya mungkin BKIPM ini, kita memang tahu seperti Pak Ketua sampaikan sudah ada undang-undang yang eksisting tapi belum teraplikasi. Pertanyaannya, Ibu mengajukan anggaran hari ini yang saya pahami dan yang saya baca Juli 2023 itu sudah harus jalan. Menjadi pertanyaan kedua, apakah ini dicabut seakarnya atau ada pemisahan? Kemudian, asetnya karena ini terjadi di mitra kami yang lain, ini masalah asset ini sampai hari ini, itu bermasalah. Jadi, kami butuh kejelasan tadi masalah PRL juga, apabila perlu kita diskusikan lebih

dalam, karena apa? pasal per pasalnya itu harus detail, karena saya lihat di Pasal 5 dan Pasal 7 kalau memang ada FGD, prioritasin disitu. Selama Pasal 5 Pasal 7 itu, Bapak Dirjen sampaikan dengan tepat, Pak Menteri, mungkin bisa kita rasionalisasi dan dengan disinkronkan juga dengan undang-undang yang sedang dijalani oleh kawan-kawan Panja. Kemudian yang kedua, BKIPM, kami butuh detailnya juga seperti apa, apakah *root*-nya ditarik atau *enggak*.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih, Ibu Doktor Kiky.

Tentang Kalaju itu di tempat saya itu sudah 10 kali survei juga, sama, belum jalan juga. 10 kali survei, Blitar pindah ke Tulungagung, enggak tahu Pak Endro mungkin berhasil, saya *enggak* tahu. Survey juga ya kita satu Dapil. Blitar *enggak* jadi, Tulungagung *enggak* jadi, bolak-balik dan sampai sekarang belum, Pak Menteri, sampai pensiun *enggak* jadi.

Baik.

Selanjutnya, Pak Hanan silakan.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati,

Pertama, saya ingin mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, apapun yang kita perbuat, kita kerjakan di 2024 hendaknya diprioritaskan untuk hal-hal yang mungkin perlu diintervensi lebih besars terkait dengan capaian-capaian selama 5 tahun terakhir yang belum tercapai. Untuk itu, harus ada keikhlasan, kerelaan masing-masing Eselon I manakala ada pergeseran-pergeseran anggaran terkait dengan prioritas untuk memenuhi target-target yang belum tercapai selama 4 tahun terakhir sehingga di 2024 capaian-capaian diharapkan di RPJMN 2020-2024 itu bisa terpenuhi.

Kemudian yang kedua, saya ingin mengingatkan juga terkait dengan program-program batuan pembangunan dan sebagainya khususnya terkait dengan pembangunan atau pengadaan sarana prasarana yang seyogyanya

pembangunan atau pengadaan sarana prasarana tersebut merupakan domain daripada BUMN, kita misalnya PT Perum Perindo. Banyak hal-hal yang kita bangun yang lalu ya, yang kami lihat terpaksa dioptimalkan oleh Perindo karena tidak mungkin dioperasikan oleh lembaga birokrasi, Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, terkait dengan pembangunan-pembangunan *cold storage* gudang beku dan sebagainya mungkin kita serahkan saja, ini tidak diintervensi oleh APBN, kita serahkan kepada Perum Perindo yang lebih professional untuk mengelola kegiatan-kegiatan pasca panen hasil-hasil perikanan.

Yang ketiga, terkait dengan Kalaju. Kami sangat setuju, sangat mendukung ini ternyata dampaknya luar biasa di bawah, karena apa? sebagian besar kampung nelayan ini dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan kampung atau desa-desa yang lain. Intervensi APBN, intervensi pemerintah ini diperlukan khususnya untuk hal-hal infrastruktur Pak, yang saya tekankan. Infrastruktur untuk kepentingan umum yang tidak mungkin atau kecil kemungkinan untuk dibiayai oleh masyarakat. *Nah*, ini lah yang jadi perhatian Pak, sedangkan hal-hal yang merupakan domainnya masyarakat ya mungkin kita kurangi atau sifatnya contoh-contoh saja. Kampung nelayan maju perlu diperluas perlu intervensi karena terus terang kampung nelayan ini dibandingkan dengan yang lainnya adanya ketertinggalan.

Kemudian yang berikutnya, terkait dengan sertifikasi lahan atau tanah milik nelayan. Mohon ini bisa dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN karena mereka ada program namanya PTSL/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kalau tidak salah seperti itu. Ini ditargetkan akan selesai di tahun 2024, semua lahan masyarakat itu di 2024 se-republik ini, diharapkan sudah bisa didaftarkan di ATR/BPN, kemudian yang memenuhi syarat akan disertifikasi cuma-cuma, tidak ada biaya pungut dari rakyat. Oleh karena itu, walaupun ada pembiayaan-pembiayaan terkait dengan sertifikasi lahan atau tanah nelayan, ini coba dilihat lagi ditinjau urgensinya seperti apa, walaupun ada pembiayaan-pembiayaan untuk membiayain kegiatan-kegiatan sertifikasi lahan nelayan.

Saya kira ini karena kita tadi kata Pak Ketua baru pembicaraan pendahuluan, *nah* kita lihat hal-hal yang benar-benar perlu kita intervensi dengan segala keterbatasannya anggaran yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita prioritas untuk memenuhi target-target selama 5 tahun yang belum tercapai yang perlu diintervensi yang lebih baik lagi. Saya kira ini Pak Ketua, Bu Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih, Pak Hanan.

Pak Haerudin, silakan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Pak Menteri KKP, Pak Sekjen, beserta seluruh Eselon I dan seluruh perusahaan milik negara yang melengkap sebagai mitra Komisi IV dari perikanan yang hadir pada hari ini,

Mohon maaf kami tidak bisa menyebut satu-persatu tetapi tentu penghargaan kami, *Alhamdulillah*, semoga semua sehat dan sukses dalam pengabdian kita semua ini.

Pak Menteri, ingin kami sampaikan bahwa kami hari ini kita sedang merancang bagaimana perbaikan program di masa depan, program bagaimana pembangunan nelayan kita di masa depan jauh lebih baik, bagaimana ruang laut kita di masa depan juga jauh lebih terjaga dan lebih menghasilkan kemaslahatan kata bahasa Pak Menteri itu. Mudah-mudahan kemaslahatan itu adalah dijabarkan dalam konteks bagaimana selalu memperbaiki karena kata maslahat itu adalah kata dimana setiap saat kita memperbaiki keadaan jauh lebih baik, tapi kalau memperbaiki keadaan berpenghasilan dan merusak, itu bukan maslahat tapi kami menyimpan sebuah investasi nanti anak cucu kita sengsara. Isu strategis kelautan Pak Menteri, pertama dari sisi sumber daya nelayan. Yang kedua, produktivitas nelayan kita. Yang ketiga, sisi kompetisi harga bagaimana nelayan kita mendapatkan harga yang layak dari sisi hasil mereka dapatkan. Kalau sampai hari ini walaupun kita punya neraca baik bahwa nelayan kita punya harga bagus, tapi di lapangan kan kita paham bahwa nelayan itu sudah kayak terikat oleh para tengkulak dan yang lain, bagaimana kita membela mereka?

Yang selanjutnya, di ruang tangkap, kita lihat nanti ke depan pelabuhan-pelabuhan yang bermasalah karena sisi sedimentasi. Jadi, bagaimana kita menganggarkan program merger dengan PUPR karena butuh pengerukan muara-muara yang dipakai ataupun pelabuhan-pelabuhan yang dipakai tempat pendaratan ikan dan itu sekarang mengalami sedimentasi karena kita sadar hutan kita sudah gundul dan musim penghujan, musim air besar, lumpur dari gunung itu akan turun ke muara semua. Dan ini contohnya bukan hanya di Dapil saya saja tetapi tentunya dimanapun pasti begitu dan ini apa yang harus kita rancang ke depan pelabuhan-pelabuhan pendaratan nelayan ini baik. Karena kenyataannya banyak kita membangun pemecah gelombang, tapi akhirnya pemecah gelombang itu jadi tempat dimana disatukannya pasir laut dan menjadi darat. Malah nelayannya tidak bisa mendaratkan perahunya disitu. Nah, ini bermasalah. Apakah ini karena gagal merancang, gagal perencanaan akhirnya gagal pembangunan ataupun kita selalu memang ingin simple tapi bermasalah. Saya pernah ingatkan di bulan-bulan lalu, inventarisir ataupun evaluasi kepada para konsultan yang merancang pemecah gelombang laut yang selalu gagal dan saya bisa buktikan inventarisasinya dari mulai Sukabumi sampai ke daerah Pangandaran, hanya berapa yang sukses dan ada berapa

puluh yang gagal. Itu ada kesalahan, apa karena dipaksakan anggaran yang sederhana ataukah ada masalah di perencanaan. Makanya saya ke Pak Zaini walaupun hari ini sudah ganti yang baru ada Plt, minta dievaluasi konsultan kita itu. Masa' semua proses pembangunan pemecah gelombang gagal semua

Di budidaya, kami ingatkan Pak TB, Pak Menteri, ke depan itu kita fokus pada tambak rakyat. Bagaimana rakyat kita lebih banyak yang terlibat dalam proses keterlibatan ekonomi perikanan kita. Syukur-syukur, Pak Menteri punya gagasan, punya program, nelayan kita tidak jadi buruh di negeri sendiri. Betul-betul nelayan kita itu para petambak ikan kita itu lah tuannya di negerinya. Syukur-syukur punya program itu kita itu. *Nah*, makanya kita pernah sampaikan, para penangkap benur kan bermasalah hari ini karena mereka menangkap benur sementara pembiakannya, pembesarannya dimana? kan tidak nyambung dengan konsep kita, benur sekarang *enggak* boleh kita impor-impor, *enggak* boleh ekspor kita benur itu. Kalau ekspor nanti kan kita pidana dan banyak orang yang ditangkap hari ini tapi kita tidak akan kasih solusi. *Nih* Pak TB *nih*, bagaimana caranya mereka bisa bekerja sama dengan para petambak untuk pembesaran sehingga kita bisa nanti impor indukan-indukan yang lebih baik harganya, lebih produktif untuk masyarakat kita. *Nah*, mohon di rancangan ini dimasukkan *nih*, ini kan belum masuk nih di kita sekarang ini.

Yang kami ingatkan beberapa hal itu, Pak Menteri. Mudah-mudahan menjadi catatan dan pertimbangan untuk perbaikan program lebih strategis ke depan. Saya setuju kata Pak Hanan, ini adalah pertarungan program jangka panjang kita, jangka menengah kita hari ini di akhir periode kepemimpinan 5 tahunan Pak Jokowi, tentu dengan sekaligus dengan para menterinya dan ini adalah pertarungan. Dan jejak rekam kita, Pak Menteri pasti akan menjadi catatan, zaman Pak Sakti, kami semua adalah menjadi nelayan sakti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Walaikumsalam.

Dapil mana ini? Dapil Lampung.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H):

Ada kelebihan nanti.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik.

Terima kasih Pak Haerudin tentang sedimentasi ini, Pak Menteri memang tidak hanya di satu dua titik, banyak sekali. Bahkan kita pernah datang Kunker kalau tidak salah di Demak atau Tegal ya itu sampai memakan korban.

Jadi, beberapa nelayan yang terpaksa yang sangat kesusahan dan akhirnya mereka meninggal karena sedimentasi. Ini perlu perhatian dan saya juga kemarin bertemu dengan teman-teman dari Demak seperti itu juga.

Selanjutnya, Pak Slamet. Pak Hermanto *kok* pakai kopiah dalam rangka apa ini?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Dalam rangka menjelang Idul Adha, Bu.

KETUA RAPAT:

Bukan, ini jelang kemarin Penas sukses. Sukses membohongi rakyat lagi pakai biosaka.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Terima kasih, Bu Ketua, Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen dan seluruh staf KKP yang hadir yang saya hormati,

Ada beberapa terkait dengan anggaran ya memang pagunya seperti itu tinggal kemudian secara prinsip pagunya programnya tinggal evaluasi sebelumnya, Pak. Nanti ketika sudah dirapat berikutnya baru kita akan dalam. Tadi saya buka-buka juga *shrimp estate* apakah nanti ada lagi, itu ternyata tidak kita minta evaluasi nanti yang di Kebumen, itu juga menjadi perhatian bagi kami seperti itu.

Nah, berikutnya, yang terkait dengan anggaran juga, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Mba Kiky, jadi Pak Agus ya Plt nya, Pak ya? jadi mohon izin, Pak Menteri. Kalau Pak Zaini mengurus Kalaju sampai pensiun *enggak* berhasil gitu ya harapannya dengan semangat baru, Plt baru, Pak Menteri, agar Plt nya didefinitifkan Kalaju harus sukses. Jadi ini karena program sebelumnya juga tertunda, sekarang mudah-mudahan di bulan-bulan yang akan datang Kalaju ini sudah karena sudah disurvei, Pak, sudah disurvei, tidak ada *follow up*, Kadesnya terus ke kita Pak, jadi ini menjadi PR kita.

Yang berikutnya, ini terkait dengan PP 26, Pak Menteri. Jadi ini nampaknya kalau dibahas di ruang ini karena kemarin saya juga sudah sempat dengan Pak Wahyu yang Jubir itu, masing-masing kan punya jurnal, Pak. Jadi, yang bermazhab ingin merusak juga ada jurnalnya kata Pak Wahyu yang Jubir ada hadir disini, itu juga dengan gagahnya ada jurnalnya juga. Di saat yang

sama, saya tidak melihat ada RPP yang melibatkan public. kami tahu-tahunya langsung muncul PP Pak, biasanya PP juga ya minimal angin-angin sayup dengar lah oh ada PP ini sehingga ini yang kemudian membuat kami ada kecurigaan apalagi kemudian setelah kami membaca isinya, kan gitu ya. Jadi, kami juga *print out*, Pak, kami generasi lama juga kalau baca harus di *print out* bukan seperti Mba Kiky, kami harus pakai *hard copy*, kami dalam itu sehingga kami juga tidak menolak niat baik dari pemerintah tapi jangan sampai tidak transparansi. Ini ada penumpang gelap terhadap PP ini, ini yang kami khawatirkan.

Oleh karena itu, rasa-rasanya memang pembahasannya perlu ruang yang terbuka khusus untuk bahas PP ini, apa judulnya. Kalau ini Bu Anggi lebih paham gitu, sehingga betul-betul transparansi ada, Pak. Apakah uji pendahuluannya sudah dilakukan yang disampaikan bahwa dengan alat yang canggih waktu itu juru bicaranya tidak akan merusak jurnalnya mana, sehingga kami bisa... jadi posisinya kami kan akan memberikan dukungan kalau ini memang menghadirkan PNBPN, kan gitu. Apakah juga ini terkait dengan PNBPN yang dijanjikan oleh Pak Menteri. saya di pikiran juga begitu dengan semangatnya Pak Menteri ketika dilantik kan janjinya, berpa? enam ya, sekarang sudah 1,9, apakah pasir ini juga akan menjadi bagian dari mengejar PNBPN itu tetapi tadi kami, Komisi IV mitranya juga harus mengawal ekologi kita. Jangan sampai kemudian ekologi dikalahkan oleh ekonomi sehingga ekologi kita akan rusak. Jadi, ini saya mengusulkan riil PP ini harus kemudian disampaikan, minimal di Komisi IV karena ini kami tidak melihat RPP yang diajukan publik. Secara prinsip ya kalau memang merugikan, kami terus terang Pak, saya ragu dengan model atau dengan pengawasan yang selama ini masih lemah begitu ya. Niat baik PNBPN yang dijadikan Pak Menteri itu dengan pengawasan yang lemah, khawatir gitu ya, memperkaya blok-blok tertentu, kelompok-kelompok tertentu, sementara negara kemudian tetap seperti itu tidak mendapatkan tambahan-tambahan. Kalau pun mendapatkan tambahan tidak sebanding dengan perusakan ekologi-ekologi dibandingkan. Apalagi terus terang betul kami sedang membahas Undang-Undang KSDAHE revisi itu. Kalau kemudian nanti di kawasan baik kemudian di lautan juga menjadi rusak, maka tidak akan ada artinya.

Barangkali itu Pak Ketua, Pimpinan, Pak Menteri yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Walaikumsalam.

Pak Ketua, mau bicara?

KETUA RAPAT:

Boleh *enggak* masalah PP 26 ini tadi sudah banyak yang bertanya, kan hal nya juga sama, ya kan kalau bila perlu kita adakan FGD, khusus termasuk juga memanggil para pakar-pakar yang mengatakan bahwa dengan adanya pengerukan sedimentasi itu tidak akan terjadi masalah. Gimana, Anggota? Setuju.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sebentar, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Mohon maaf, Pak, kan sudah banyak yang tanya tetapi catatan saya masih ada beberapa yang belum ditanya. Makanya saya ingin bertanya sebentar.

KETUA RAPAT:

Masalah PP 26?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Iya, betul, Pak.

KETUA RAPAT:

Atau nanti kita fokuskan di FGD.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ya, minimal kan ada kisi-kisi dari saya dulu, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke-oke.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Supaya nanti di dalam...

KETUA RAPAT:

Oke, nanti waktunya Pak Ansi nanti, ya.
Silakan, Bu Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan, Bu Yessy.

F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,

Selamat pagi,
Salam sehat untuk kita semua.

Yang pertama, kami mengapresiasi ya menyambut baik pagu anggaran KKP di tahun 2024 yang mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2023 dan kami juga mendukung secara penuh untuk kenaikan anggaran dari 6,9 T ini bisa menjadi 7,6 triliun, tentu ya dengan catatan kami yakin KKP bisa semakin bisa berkontribusi dalam penguatan sektor-sektor perikanan dan kelautan di negara Indonesia yang kita cintai.

Kemudian yang kedua, kami mengingatkan kembali tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua dan kawan-kawan yang lain terkait Kalaju dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan ke Pak TB, DJPP disini beberapa catatan yang pertama betul tadi Kalaju di Dapil saya sudah survei tapi sampai sekarang juga belum ada *reportnya* juga ke kami seperti apa.

Kemudian, yang kedua terkait hasil kesimpulan kita di Raker 29 Maret yang lalu bahwa Komisi IV itu mendorong KKP untuk menyiapkan satu program yang namanya Unit Pembenihan Rakyat. Ini kan juga sebagai salah satu langkah kita untuk mengimbangi program pengadaan ikan yang selama ini terus tidak bisa terserap secara maksimal di beberapa daerah Dapil, terutama Dapil-Dapil seperti kami yang sektor perairan umum daratnya yang lebih dominan. Kami berharap ini ada aksi nyata dari KKP tahun 2024 dan kebetulan tadi saya melihat di paparan bahan, di DJPP belum ada program terkait UPR ini, mungkin nanti bisa dijelaskan dari Pak TB karena saya melihat juga DJPP ini anggaran yang terbesar juga di KKP di 2024. Saya berpikir tidak ada alasan *sih* sebetulnya untuk tidak mendukung penguatan-penguatan dari hulu untuk sektor perekonomian masyarakat kita di daerah-daerah hulu.

Kemudian, terkait *shrimp estate* juga saya melihat beberapa berita akhir-akhir ini bahwa sudah akan dilakukan panen raya, kalau tidak salah di bulan Juni ini, di beberapa hari ke depan dan saya baca juga sudah dua kali panen parsial dan sekali lagi juga kami mengingatkan bahwa *shrimp estate* Kebumen ini bukan hanya bicara sebatas ini sebagai studi, sebagai riset, dan juga sebagai percontohan nasional tapi ini juga harus betul-betul sukses. Dan mungkin kami meminta *reportnya* dari KKP seperti apa sudah *progress* ini dan

kemungkinan panen rayanya di bulan Juni. Kami berharap ini bisa menjadi program yang sukses ke depan.

Pak Ketua, izin juga terkait PP 26, memang tadi sudah menjadi catatan dari Pak Ketua bahwa ini akan diadakan ruang khusus yang lebih dalam tapi betul kata Kak Ansi disampaikan poin bahwa yang mungkin tadi belum tersentuh oleh teman-teman yang lain. Yang pertama, kalau kami melihat bahwa yang menjadi polemik di masyarakat di publik, ini sebetulnya lebih kepada terkait pemanfaatan hasil sedimentasi ini yaitu pasir ekspor, ekspor pasir. Ini yang menjadi persoalan besar dan kami juga melihat ini masih terlalu bias dan liar jika aturan turunannya tidak betul-betul bisa menjadi penguatan yang baik karena kalau melihat saya membaca sekilas dari PP yang sudah itu ada, ada beberapa poin yang pertama saya melihat alasan salah satunya karena alur pelayaran nelayan, kemudian juga saya berpikir bahwa ini larinya ke lintas kementerian Lembaga sebetulnya karena kalau sudah bicara alur lalu lintasnya lebih ke Kementerian Perhubungan. Kemudian juga untuk pasirnya, tambangnya ini bisa jadi nanti ke Kementerian ESDM juga.

Nah, ini yang menjadi catatan dari kami bahwa potensi bias tumpang tindih regulasi, kebijakan, kepentingan pemerintah pusat dan daerah ke depan juga cenderung ini akan timbul dengan PP ini. Kami berharap ini bisa menjadi kajian kita bersama dan ketika membuat kajian-kajian lebih jauh ke depan, publik, kementerian terkait, kemudian pihak-pihak terkait itu bisa dilibatkan.

Mungkin itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya, Pak Edward Tannur. Biasanya kalau beliau *to the point*, satu menit langsung selesai.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Terima kasih banyak.

Pak Pimpinan Komisi IV DPR RI beserta Anggotanya,

Ini sedikit mengalami gangguan audio ini, suaranya agak serak ini. Jadi mohon maaf kalau penyampaiannya tidak jelas, bisa dikoreksi ulang lagi.

Jadi Pak Menteri beserta jajarannya, Dirut PT Garam, RNI ya, Pak? singkatnya, semua yang hadir dalam ruangan ini, saya sampaikan banyak terima kasih.

Memang kita ngomong tentang KKP ini memang ya kita harus beri apresiasi karena dari tahun ke tahun ada peningkatan walaupun lamban. Tapi,

ada, itu artinya mau bergerak maju, jangan sampai dia mandek stop, *nah* itu kita celaka sudah. Jadi, saya memberikan apresiasi dan saya paham betul Menteri KKP ini punya satu kemampuan dan punya satu tekad bagaimana supaya dari perikanan atau kelautan ini kita bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk NKRI ini. Cuma ini barang kan butuh proses, jadi memang disana sini ada kelebihan ada kelemahan, tidak ada masalah. Kita mari bahu membahu untuk berjuang.

Ini saya hanya catat beberapa poin saja yang perlu saya sampaikan disini. Saya mewakili Partai Kebangkitan Bangsa/PKB. Saya dari NTT, saya senang tadi ada satu poin nanti akan saya sampaikan saya merasa bahagia sekali karena ternyata pemerintah menyisipkan satu program yang sangat besar. Saya dengan Pak Ansi sangat senang karena ini menunjukkan bahwa kami bermanfaat duduk di Komisi IV ini ada manfaat nyata supaya terpilih lagi *dong*.

KETUA RAPAT:

Karena PKB punya Cawapres, gitu kan.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Jadi, baik.

Mengenai pengentasan angka kemiskinan, emang kita NKRI ini kan satu sasaran utamanya itu kan supaya mengurangi, kalau mau menghabiskan tidak bisa, mengurangi orang miskin di Indonesia. Itu adalah satu tujuan dari bernegara, kalau kita piara orang miskin semua, ini buat apa negara ini. Kita hidup susah terus, jadi itu saya setuju itu pengentasan kemiskinan tapi kita perlu mendukung program-program KKP karena ini tujuannya sudah jelas apa yang ini.

Mengenai target penyampaian atau meningkatkan ini apa target-target yang saya lihat disini. Tahun 2024 ini semuanya naik, tidak ada yang stagnan, semuanya bertambah, ini baik. Artinya, orang punya motivasi jangan sampai kita takut berkembang naik, akhirnya kita pesimis. Jadi orang harus optimis seperti tadi sudah minta tambah lagi anggaran 714 miliar, *nah* itu baik. Artinya sinkron mau naik target anggaran juga harus naik, jangan sampai ditekan mau naik target tapi anggarannya tidak naik. Ini artinya pemikiran orang yang rasional. Jadi apa yang sudah disampaikan ini, mudah-mudahan target yang ditetapkan dengan rencana yang disampaikan ini jangan hanya sebagai macam kertas, harus direalisasikan sehingga kami bisa mendukung sepenuhnya. Jangan sampai kita dukung habis, itu tadi seperti yang bilang kalah juga sudah 2 tahun *enggak* jalan-jalan. Mudah-mudahan tahun ini Kalajunya bisa berjalan, jangan kita hanya program-program, habis coret, habis masalah. Jadi, tolong dikaji yang baik karena Kalaju ini sangat penting, terlebih bagi perkampungan nelayan-nelayan miskin ini sangat menyedihkan. Dengan adanya program ini, bisa membangkitkan semangat nelayan-nelayan itu tradisional itu. Dia bingung ini kita mau kerja apa duit juga *enggak* ada, fasilitas

juga tidak ada. Kamu berdoa banyak supaya tahun-tahun ke depan KKP bisa memberikan bantuan-bantuan nyata ke perkampungan nelayan.

Mengenai garam, kita ketahui bersama bahwa kita ini kan hanya produksi kurang lebih 1 juta ton garam. Kan kita untuk garam industri kita masih impor ketergantungan pada impor untuk garam industri sangat tinggi. Ini yang membuat saya selalu bertanya, apakah tidak bisa diupayakan untuk Indonesia ini dikatakan bahwa garis pantai, lahan luas, tapi *kok* kita masih impor garam industri. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah garam yang kita impor lebih murah daripada garam industri yang kita produksi. Kalau memang lebih murah, ya saya kira bisa kita setuju, tapi kalau garam yang kita impor lebih mahal atau sama dengan yang kita produksi di Indonesia, saya kira kita produksi saja. Ini kan salah satunya merupakan harga diri bangsa ini. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Menteri, supaya tolong dikaji ulang kendala apa yang membuat kita tidak bisa memproduksi garam industri secara sendiri di dalam negeri. Kemungkinan mungkin ya kualitas atau harga produksinya tidak berimbang, itu mungkin satu, dua alasan yang bisa kita terima.

Yang tadi saya bilang itu tambak udang yang akan dibangun di NTT 1.800 hektar. Saya sangat apresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian KKP berarti melihat Indonesia ini bukan hanya melihat barat, tengah, tapi timur ini yang orang daerahnya sudah terpencil lagi miskin lagi, tambah busung lapar lagi, sekarang semua itu daerah busung lapar itu, rabies di timor. Jadi, ya *food estate* sudah masuk ke Sumba. Ya itu memang perhatian pemerintah. Cuma *food estate* ini jalan di tempat ini, kita belum tahu itu. Ya, sudahlah itu pertanian. Sekarang kita ngomongin mengenai KKP. Jadi apresiasi yang saya berikan ini mudah-mudahan apa yang Pak Menteri sudah programkan, saya berdoa semoga berjalan lancar. Jangan sampai stop di tengah jalan. Sedikit lagi. Disana hama belalang merajalela tapi itu bagiannya pertanian, sekarang kita ngomong perikanan. Jadi, sumber daya alamnya cukup kaya, cuma sumber daya duitnya, ekonominya kurang disana.

Mengenai peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia ini, ini memang semua orang gembar-gemborkan untuk mau tingkatkan tapi kita bingung mau ditingkatkan dari mana ini sekarang. Alam kaya sekali tapi trik kita untuk masuk untuk bisa menjembatani atau memecahkan permasalahan ini sangat rumit.

Terakhir, saya beri apresiasi juga kepada Pak TB mengenai budidaya ikan air tawar sudah oke dan bibitnya sudah kami terima. Mungkin karena perpindahan dari Madiangin pindah ke NTB ya jadi lebih dekat, resikonya juga lebih kecil, dan ikannya sehat. Cuma ada satu kurang lagi, ukurannya, ukurannya bagaimana ini bagian penyedia ini. Kita kan sudah sepakat 5 sampai 8 ya, jadi Pak TB tolong berikan peringatan kartu kuning untuk bagian penyedia ini. Ini gimana ini banyak yang meninggal dunia ini, repot sudah.

Jadi, terima kasih banyak Pak Ketua dan seluruh *stake holder* yang ada di sini. Saya sangat memberikan apresiasi niat baik kita saya kira sangat bagus. Tinggal bagaimana kita sinkronkan saja, terima kasih.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Baru sekali ini mengucapkan apresiasi enam kali. Biasanya selalu bilang berulang-ulang bibit bayi.

Yang mewakili PT Garam ada *enggak*?

DIREKTUR OPERASI DAN PENGEMBANGAN PT GARAM (PERSERO):

Izin, Pak, saya mewakili Pak Dirut.

KETUA RAPAT:

Pak Dirutnya kemana?

DIREKTUR OPERASI DAN PENGEMBANGAN PT GARAM (PERSERO):

Pas lagi ikut Penas, Pak. Lagi OTW kesini, Pak.

KETUA RAPAT:

Harusnya, ini kita pakai etika ini, harusnya apabila tidak hadir atau terlambat buat surat *dong*.

DIREKTUR OPERASI DAN PENGEMBANGAN PT GARAM (PERSERO):

Ada, Pak

KETUA RAPAT:

Sampaikan pada Dirutnya kalau perlu *enggak* usah hadir hari ini. Harusnya kalau Bapak bawa surat, langsung serahkan dulu tadi sebelum rapat kerja. Coba RNI nanti dievaluasi *tuh*.

Selanjutnya, Ibu Nur'aeni, silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S. Sos., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan beserta Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta Sekjen dan Dirjen dan para jajarannya,

Kaitan dengan anggaran untuk 2024, tentu ini kami sangat mendukung sekali untuk bisa bagaimana Kementerian KKP ini diberikan mungkin anggaran dalam pembangunan kelautan dan perikanan Republik Indonesia. Pesan kami mohon dibuat suatu perencanaan terukur dan terarah serta tepat sasaran untuk bisa mempercepat transformasi ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan. Karena memang anggarannya sedikit, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya sekaligus juga dengan mengevaluasi terhadap program-program di tahun 2022 yang memang tidak tepat sasaran.

Dalam hal ini, kami mencoba saya mencoba untuk bisa melihat menganalisis terhadap indikator kinerja utama dari KKP baik secara capaian maupun target di 2023-2024. Walaupun memang disini capaian serta target dari KKP sendiri sedikit ya, sedikit digit, memang capaiannya ini sesuai dengan target yang diharapkan oleh KKP, ini sangat disayangkan. Sebetulnya, target yang disampaikan oleh KKP ini, saya kira sedikit, ini artinya berarti KKP masih ragu untuk bisa melakukan pencapaian target yang diinginkan dalam hal peningkatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan ini. Sementara itu, kita tahu lah Pak Menteri ini kan *basic* nya pengusaha, paling tidak Pak Menteri punya pengalaman lah terhadap peluang untuk bisa bagaimana sektor perikanan dan kelautan serta pergaraman Republik Indonesia ini untuk bisa dioptimalkan agar target-target itu bisa ditingkatkan, kalau ini kan sedikit-sedikit walaupun ada peningkatan tapi sedikit. Artinya, Pak Menteri disini saya melihat masih ada keragu-raguan. Apakah mungkin keraguan Pak Menteri ini karena anggaran yang sedikit atau memang kementerian ini hanya bisa bekerja melihat dari anggaran yang diberikan. Padahal kalau dari sisi potensi, sektor kelautan perikanan walaupun diberikan anggaran yang minim pun ini kalau dikelola dengan sebaik-baiknya itu akan mendapatkan mungkin nilai ekonomi yang tambah besar dilihat dari peluang.

Nah, untuk sisi indikator kinerja utama, contoh misalkan produksi perikanan. Saya melihat kan hanya berapa 3,02% mungkin target yang akan dicapai, ini kan berarti ragu. Belum lagi saat ini, tadi teman-teman juga mengingatkan bahwa PP 26/2023 ini tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi. Belum ada PP ini saja produksi perikananannya sedikit peningkatannya, apalagi kalau ditambah dengan kebijakan ini. *Nah*, ini mohon untuk bisa evaluasi ya ataupun mungkin kajian yang mendalam. Kalau pun ini diberlakukan jangan sampai menurunkan tingkat produksi perikanan nasional kita.

Berikutnya, produksi garam tadi disampaikan pula bahwa produksi garam kita ini kan tingkat konsumsinya tinggi, kebutuhan akan garam nasional kita tinggi baik untuk industri maupun konsumsi. Akan tetapi, pemerintah kita masih saja untuk melakukan impor untuk pemenuhan kebutuhan industri. *Nah*, seperti apa KKP melalui Dirjen terkait memiliki strategi ke sana agar peluang untuk sektor pergaraman nasional kita ini, kita ambil, agar petambak garam yang ada di seluruh Indonesia di wilayah-wilayah pesisir ini bangkit kembali untuk membantu perekonomian petambak dan perekonomian nasional kita.

Kaitan dengan indikator kinerja utama dari konsumsi ikan, Pak Menteri, walaupun ini ada peningkatan tapi tiap daerah contoh di Banten saja, konsumsi ikan kita masih sangat rendah sehingga menyebabkan banyak masyarakatnya yang *stunting* dan gizi buruk. *Nah*, ini mohon kiranya Pak Menteri KKP juga ikut mengintervensi terhadap indikator kinerja utama seperti ini.

Berikutnya, nilai tukar nelayan. Ini juga sedikit sekali walaupun ada peningkatan target. Seberapa besar sumbangsih dari KKP dalam penurunan angka kemiskinan Republik Indonesia ini? Kalau melihat dari indikator utama

ini, artinya Kementerian KKP itu tidak berusaha ya untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan di Republik Indonesia ini. Dan kaitan dengan luasan kawasan konservasi perairan, mohon dijelaskan berapa sebetulnya luasan konservasi perairan di tanah air kita ini. Itu juga kita ingin tahu lebih mendalam seperti apa.

Berikutnya, saya juga ingin mendalami beberapa Dirjen terhadap usulan rancangan kegiatan prioritas KKP tahun 2024.

Pertama, untuk Dirjen Perikanan Tangkap mohon dievaluasi saya kira Kampung Nelayan Maju/Kalaju walaupun dari kemarin 2 tahun yang lalu, ini selalu muncul akan tapi kenyataannya di Dapil saya pun ini tidak ada *actionnya*. Mohon penjelasannya kenapa bisa seperti ini. Ada rencana pengembangan pelabuhan perikanan yang terintegrasi bertaraf internasional di dua lokasi. Mohon dijelaskan dua lokasi pelabuhan tersebut dimana saja.

Direktorat Jenderal Budidaya, mohon dievaluasi pula gerakan bersih sampah plastik. Ini programnya sangat keren, saya kira, tapi dari sisi realisasinya ini juga nol ya, nol kerennya. Perlu penjelasan ini lokasi tambak udang dan bandeng yang akan dilakukan revitalisasi di wilayah mana saja dan berapa anggaran yang dimintakan ya. Ini terdapat rencana pengembangan *bird stock center* berjumlah 3 unit. Apakah jumlah tersebut memenuhi kebutuhan yang ada untuk bisa memenuhi 34 provinsi?

Terhadap Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, ada major proyek PDS merencanakan pembangunan pengembangan pasar ikan bertaraf internasional. Semuanya bertaraf internasional *nih* Pak Menteri ya, mohon dijelaskan lokasinya dimana dan konsepnya seperti apa. Apakah memang akan dibuat pasar ikan modern yang sudah ada seperti di Muara Baru? Ini lokasinya harus tepat, Pak Menteri, jangan sampai di depan mata kita seperti di Muara Baru tidak dilirik tetapi terlalu muluk-muluk di wilayah-wilayah yang belum pasti.

Untuk Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, ini ada satu program yang bernama *ocean account*, ini mohon dijelaskan terhadap program tersebut dan target sarannya seperti apa.

Badan Karantina, kaitan dengan pembentukan badan karantina nasional, ini progresnya seperti apa.

Terakhir Pak Menteri, ini dari Dapil, baik itu mungkin kaitan dengan PP 26 ataupun yang sudah berjalan, adanya perluasan reklamasi dari beberapa perusahaan yang menyebabkan tumbang para nelayan sekitar Tanjung Pening sudah melakukan audiens juga dengan Komisi VI. Mohon, Menteri KKP apakah sudah melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah laut yang ada di provinsi Banten? Ini sangat merugikan para nelayan kita yang sudah miskin dengan adanya reklamasi pantai oleh perusahaan-perusahaan, semakin miskin pula para nelayan yang ada di sekitar tersebut.

Terima kasih Pak Menteri. Mohon ditindaklanjuti apa yang saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi tadi masalah sampah itu bukan di Dirjen Budidaya. Nanti Dirjen Budidaya Sampah Laut lagi, itu adanya di PRL. Harus jelas ya.

Kemudian, selanjutnya Bu Ema. Silakan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Ya, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,
Bapak Menteri KKP beserta jajaran yang kami hormati,

Yang pertama, lagi-lagi tentang PP 26/2023, Pak Menteri. Jadi dengan PP 26/2023, pentingnya pemerintah melakukan kajian yang matang dalam pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Kajian tersebut dilakukan untuk menjamin pemanfaatan hasil sedimentasi tidak memberi dampak negatif bagi lingkungan seperti terjadinya abrasi. Dengan adanya kajian tersebut, tentu akan menjawab kekhawatiran publik mengenai potensi-potensi kerusakan ekosistem dari aktivitas pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Dengan terbitnya PP 26/2023 ini seharusnya dapat dijadikan sebagai terobosan karena aturan tersebut mencakup aspek perlindungan ekosistem sekaligus mempertimbangkan manfaat ekonomi dari hasil sedimentasi. Mengingat saat ini banyak kegiatan reklamasi di Indonesia, maka dengan adanya regulasi ini material yang dibutuhkan menjadi jelas sumbernya. Jangan sampai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut hanya sebagai kedok untuk mengeruk dan mengeksplor pasir laut dan merusak lingkungan atau ekosistem khususnya di wilayah pesisir, mohon petunjuk dan pencerahannya.

Yang kedua, Bapak Presiden telah menetapkan peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada 27 Oktober 2022. Perpres itu mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pembangunan pergaraman guna memenuhi kebutuhan garam nasional. Kebetulan garam nasional sudah dapat dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024 ini. Mohon penjelasan terkait pernyataan tersebut.

Dan ini ada sedikit saran dan masukan untuk PT Garam. Pemerintah dinilai perlu fokus membenahi sentra-sentra garam agar produktivitas bisa meningkat. Produktivitas tambak garam yang di kisaran 80 ton per hektar harus ditingkatkan menjadi 100 sampai 110 ton per hektar. Dicontohkan beberapa petambak garam di Pamekasan, Madura, Jawa Timur mampu menghasilkan

125 ton per hektar garam antara lain dengan teknologi geomembrane dan kesiapan saluran irigasi dan kolam penampung air.

Di sisi lain, BUMN Garam yakni PT Garam perlu didorong peningkatan produksi dan pengolahan garam karena selama ini dinilai masih rendah yakni kisaran 300.000-350.000 ton per tahun. Dari data Kementerian KKP kebutuhan akan garam nasional sekitar 4,5 juta ton per tahun. Dari jumlah itu industri CAP menjadi pengguna garam tertinggi yakni kisaran 2,2 juta ton sampai 2,3 juta ton per tahun. Garam untuk konsumsi kisaran 1,5 juta ton per tahun dan selebihnya diserap industry lain. Sementara, produksi garam nasional rata-rata 1,5 sampai 1,7 juta ton per tahun. Selama ini, daya tampung garam nasional yang dibangun KKP dinilai sangat minim dan ini kisaran 2.000 ton per unit. Kami kira pemerintah dalam hal ini perlu membangun gudang berkapasitas sangat besar diperlukan untuk menyerap garam di saat berlimpah dan menggunakannya disaat produksi merosot, itu saran yang pertama.

Yang kedua, kalau memungkinkan ya dibatasi impor garam dan kita dorong pemerintah daerah juga agar produksi garam mudah diserap. Jangan sampai ketika tambak memproduksi, kualitas tidak memenuhi dan tidak terserap.

Terima kasih Pak Menteri, ini masukan dan saran dari kami.

Saya akhiri *wallahul muawiq ila aqwamith thoriq,*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau produksi garam ditingkatkan, PT Garam punya uang *enggak?* Yang kedua, permasalahannya kan transportasinya terlalu jauh. *Enggak* usah bilang apa, di Lampung itu ya Dirjen ya itu bisa mencapai 99% tapi karena dari pulau ke darat ongkosnya sudah berapa. Dari darat bawa lagi, berapa lagi ongkosnya. Kendalanya kan cuma disitu-situ saja.

Bu Endang, teman-teman saya berharap harapan saya ya sesuai dengan aturan kita 3 menit karena nanti pukul 14.00 kan kita harus rapat lagi dengan LHK.

Silakan Bu Endang.

F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Terima kasih.

Pak Ketua dan Ibu Wakil Ketua beserta para Anggota Komisi IV DPR RI, Khususnya kepada Pak Menteri beserta jajarannya,

Saya tadi menggaris bawahi, Pak, yang teman-teman kemukakan. *Nah,* karena pendalaman saya lebih fokus lagi ke Direktorat Jenderal yang terkait, Pak di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jadi, beberapa kali

kami sudah mengusulkan di Cianjur ini banyak sekali yang korban karena tidak adanya alat tangkap yang tidak memadai, Pak. Jadi, masih sangat sederhana dengan ban bekas dari truk, Pak. Nah, saya sudah berkali-kali melaporkan tapi tidak ada komunikasi yang baik. Mudah-mudahan Pak Dirjen yang baru ini bisa mengantisipasi dengan baik.

Kemudian, juga mengenai garam tadi, Pak. Jadi, di daerah Agrabinta, kami sudah mendapatkan bantuan dari Pak Menteri, terima kasih tentang ekskavator. Namun, belum bisa dipergunakan dengan baik, Pak, karena jalannya jelek sekali padahal koperasi garam disana sudah kami Analisa, Pak, kemudian bisa direkomendasikan untuk garam kosmetik dan garam kesehatan. Jadi, mohon ada bimbingan teknis, Pak, yang mengarah kesana, karena itu bisa menyejahterakan koperasi setempat.

Kemudian yang kedua, tadi Pak ada usul dari himpunan nelayan seluruh Indonesia di Kabupaten Cianjur yang berjumlah 1.500 orang memerlukan bantuan GPS, Pak, untuk mencari ikan dengan adanya perubahan iklim. *Nah*, kemudian untuk perikanan budidaya saya usulkan, Pak, di Kota Bogor ini yang sekarang sudah bersih ternyata mohon maaf ini Pak, penjual ikan hias dan ikan konsumsi yang ada di emperan toko, yang saya sudah laporkan kepada Pak TB beberapa kali, belum dapat fasilitas sehingga ikan-ikan hiasnya banyak yang mati.

Kemudian yang berikutnya adalah kincir air. Kincir air sangat diperlukan tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. *Nah*, dengan adanya kenaikan anggaran, saya mohon ada prioritas yang bisa disalurkan kepada nelayan-nelayan yang memerlukannya juga pengangkutan yaitu mobil ATI, Pak, *nah* ini butuh juga diprioritaskan karena seperti Pak Menteri ketahui, panen udang kita yang di Cidaun itu banyak sekali mengalami kerusakan pada waktu mau diekspor. Nah, ini karena lagi-lagi tidak ada pengangkutan yang baik.

Terima kasih Pak Ketua, hanya itu yang kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Jadi, Pak Menteri langsung bingung dikasih ekskavator jalannya rusak pula. Jadi, Pak Menteri harus perbaiki juga jalannya.

Selanjutnya, Pak Khalid.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua, Bu Ketua, teman-teman sekalian Komisi IV, saya banggakan, Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya banggakan,

Izin menyambung sedikit pendalaman dari Fraksi Partai Gerindra. Pertama, izinkan mungkin saya lihat ini ada Plt atau Dirjen baru dari KKP, Dirjen Tangkap. Izin saya mengingatkan bahwa dulu ada Kunker Komisi IV

menyangkut pengerukan PP (*suara tidak jelas*) saya dengar sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Saya takut anggaran itu nanti malah *enggak* terealisasi, masyarakat menunggu. Mohon agar perhatian agar dapat selesai dengan baik.

Yang kedua, terima kasih di atas mungkin banyak isu yang berkembang tentang PP 26. Saya dari Aceh jujur merasa terbantu Pak Menteri, maka pada kesempatan ini Pak Menteri, kami di Aceh panjang pantai kami 2.666 kilometer, sangat panjang sehingga banyak muara kami yang dangkal. Maka, mungkin kemarin setelah saya membaca PP 26/2023 saya pikir ini solusi, tolong ambil sedimen kami yang ada di muara-muara kami di Aceh agar masyarakat kami tidak lagi menunggu pasang untuk melaut dan tidak menunggu pasang untuk pulang. Jadi, ini saya pikir menjadi pintu dan solusi untuk menyelesaikan semua muara dangkal yang ada di Aceh. Ini harapan.

Kemarin Pak Gubernur dan orang-orang di Aceh menelpon saya tapi sampai hari ini tidak ada teknis. Maka, kami minta kepada Pak Menteri agar ada Juknisnya sehingga *nawaitu* kita untuk menyelesaikan sedimen di muara dangkal tidak merusak lingkungan.

Terima kasih saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan, Pak Ravindra. Singkat.

F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):

Izin, Ibu Ketua.

Rekan-rekan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta jajaran,

Pada bulan Mei kemarin, kami mendapatkan tamu dari jajaran Pemda Nias Utara. Tanggal 11 Februari ada kapal *tanker* berbendera Gabon Afrika membawa 2.000 ton aspal bitumen. Asalnya dari Emirates Saudi dan mengalami kebocoran dekat Nias Utara. Di estimasi telah menyebar 100 kilometer dan berdampak pada 3.300 nelayan yang tidak bisa berlayar di dekat desa Humene, Sihine'asi. Pihak KKP sudah bergerak cepat dan melakukan survei dan kami hanya ingin mengetahui apa kira-kira langkah strategis untuk penyelesaiannya. Dari pihak swasta sudah menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab.

Kemudian yang kedua, terkait PP 26, kami sangat setuju dengan usulan Ketua bahwa akan diadakan FGD. Saya juga ingin menanyakan KKP sudah menjelaskan ini bukan penambangan pasir laut tapi pengelolaan hasil sedimentasi. Bagaimana mekanisme pengawasannya agar tetap menjaga

ekosistem dan memastikan bahwa bukan penambangan karena Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 telah menerbitkan beberapa izin pertambangan biota laut termasuk di zona di atas 12 mil.

Terakhir, kami juga menyetujui bahwa anggaran KKP ditingkatkan contohnya pada Dirjen Peningkatan Daya Saing ini hanya 5% dan lebih dari setengahnya 57% dipertunjukkan untuk program nilai tambah dan daya saing industri dibandingkan dukungan manajemen. Kami berharap ada anggaran tambahan juga untuk peningkatan daya saing.

Terima kasih.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Baik, terima kasih.

Pak Ansi Lema, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

Pimpinan, Pak Menteri, Pak Sekjen, para Dirjen, Dirut RNI, Perindo, dan PT Garam yang saya hormati,

Pak Menteri, kami mendukung penuh untuk peningkatan pagu anggaran ini, Pak. Mohon kalau bisa lebih optimal lagi karena kami berharap ada kemajuan-kemajuan dari sektor perikanan dan kelautan ini.

Yang kedua, saya secara pribadi harus memberi apresiasi atas kerja KKP terutama terkait dengan program-program pemberdayaan rakyat mulai dari pelatihan hasil olahan ikan, termasuk alat-alat tangkap dan sebagainya juga bioflok kami pantau bahkan Kalaju di tempat saya sudah berjalan dengan baik, Pak. Ini harus terus dilakukan kami akan tetap mengawal secara ketat Pak.

Terkait dengan bioflok Pak, soal benih usulan konkret kami kalau boleh di setiap daerah itu dibangun unit perbenihan rakyat. Mengapa demikian, Pak TB? Karena kami lihat tingkat kematian benih yang didatangkan dari luar itu tinggi, di atas 50%, Pak.

Yang kedua, ini juga adalah upaya untuk menekan tingkat ketergantungan kita terhadap benih-benih yang datang dari luar sekaligus juga menggeliatkan para katakanlah pembudidaya benih atau produsen benih di tingkat lokal dan ini tentu akan memiliki implikasi ekonomi bagi masyarakat sekitarnya sehingga dengan pengembangan unit perbenihan rakyat ini, ini

mendekatkan para pembudidaya ikan dengan sistem bioflok antara lain dengan akses mereka terhadap benih.

Yang berikut Pak Menteri, saya lihat Pak Menteri ini memang berusaha untuk menerjemahkan visi Presiden Jokowi Indonesia sentris. Karena menerjemahkan itu, maka kemarin saya lihat di foto dan video baru pulang dari Mulut Seribu, panen lobster, terima kasih Pak. Itu kerja hebat, kerja bagus, dan kami apresiasi hanya kalau boleh dipikirkan tentang bagaimana pelibatan partisipatoris terhadap masyarakat yang ada di sekitar situ. Catatan saya itu.

Yang kedua, Pak, terkait dengan *estate-estate* ini, ada dua *estate* yang dibangun di Sumba NTT, Pak. Satu *food estate* oleh Kementerian Pertanian, yang kedua yang Bapak mau bangun ini adalah *shrimp estate*, Pak. Terus terang Pak, soal *food estate* kami punya banyak catatan, Pak. Kami berharap *shrimp estate* ini kata kuncinya mulai dari kesiapan dan perencanaan ini, ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang, Pak. Soal misalnya studi ilmiah kelayakannya, kesiapan SDM nya, skema pelibatan masyarakatnya. Jadi, ini harus betul-betul dipersiapkan sehingga kemudian apa yang diimpikan dan yang mau dilakukan secara baik oleh KKP ini di lapangannya ini juga bisa membuahkan hasil. Terima kasih Pak perhatian untuk NTT, khususnya untuk Pulau Rote dan Pulau Sumba.

Yang terakhir, terkait dengan PP 26/2023, Pak. Soal pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Jadi, PP ini membuka keran ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ini ditutup, Pak. Tentu lahirnya PP, Pak, pasti ada pemicunya. Ada alasan fundamental di balik ini dan tentu ada *sense of urgency* nya. Kalau saya merujuk pada kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri 20 tahun lalu, Pak, kenapa pelarangan ekspor pasir ini dilakukan, setidaknya ada 3 alasan penting. Yang pertama, karena kerusakan lingkungan hidup dan ini mengakibatkan terjadinya abrasi dan pemusnahan ekosistem laut, lalu mengakibatkan puluhan pulau-pulau kecil ini terancam tenggelam serta ada aspek Geopolitik terkait dengan ancaman konflik batas wilayah karena makin meluasnya wilayah Singapura akibat reklamasi dari pasir kita, Pak.

Pertanyaan pertama saya, Pak, apakah alasan pelarangan ekspor pasir laut yang saya sebutkan tadi, hari ini sudah tidak kontekstual lagi alias tidak relevan sehingga keran ekspor pasir laut itu hari ini diperbolehkan. Yang kedua Pak, saya memahami betul Bapak ini seorang pengusaha ingin bekerja cepat dengan hasil dan target yang tinggi. Tapi, Pak, mohon maaf sekarang kita ini masuk dalam era demokrasi maka usul kami, Pak, walaupun PP itu ranahnya eksekutif, tetapi pelibatan partisipatoris masyarakat, transparansi, konsultasi publik, ini perlu juga dibuka sehingga kemudian Pak, kami ini tidak gelap gulita dalam tanda petik terkait dengan adanya PP ini.

Yang berikut, Pak, kami melihat dalam aspek regulasi konsiderasi atau konsideran yang disebutkan dalam PP ini itu hanya Undang-Undang Kelautan. Pertanyaannya, kenapa undang-undang terkait dengan perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, juga Undang-Undang Perikanan atau terkait dengan perlindungan terhadap pulau-pulau kecil ini tidak dijadikan konsideran, Pak.

Yang berikut, apakah ada kompensasi terkait dengan PP ini yang diperuntukkan bagi para nelayan seberapa besar potensi ekonomi, Pak, jika tadi saya menyambung yang dikatakan Pak Slamet, Pak. Jika dibandingkan dengan ancaman kerusakan ekologi, Pak.

Yang berikut, Pak, titik koordinat penambangannya ini ada dimana saja Pak? Lokus pastinya ini ada dimana saja, Pak? Bagaimana mengawasinya? Apakah KKP punya anggaran mengawasinya, Pak? Juga terkait sanksi Pak, sanksi pidana lebih khusus, Pak. Kami lihat tidak ada, bagaimana kalau terjadi pelanggaran, Pak. Apakah hanya sanksi administrative? jika demikian kesannya kita sebagai negara terlalu lemah, Pak. Karena jika hanya sanksi administratif ya dan kemudian izinnya dicabut, besok bisa tampil lagi mengurus izin baru, Pak.

Lalu, yang terakhir terkait dengan misalnya ada 3 pulau, Pak, misalnya di 1 pulau ini yang ditambang. Saya pakai istilah penambangan saja, kalau salah tolong diluruskan Pak ya, namanya juga kita diskusi, Pak. Ini terkait bentangan alam, Pak, kira-kira ada hubungan tidak, Pak, terkait dengan 3 hal ini Pak. 3 pulau ini, Pak.

saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Memang Pak Ansi luar biasa. Saya sebagai Ketua Komisi IV kalah jauh sampai sekarang belum jalan. Di sini Pimpinan belum ada yang jalan *nih* tapi Pak Ansi karena mungkin, ada dua kemungkinan sangat dekat sama Dirjen yang lama atau Dirjen yang lama takut sama, Pak Ansi. Itu aja.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau *enggak* ya ini menunjukkan bahwa sama saja ini Pimpinan sama Anggota ini, tidak kemudian Pimpinan duluan, *enggak*. Gitu kan, Pak Menteri ya? Jadi sama saja Kakak Ansi. Kita ini belum *nih*.

Silakan, Pak Ihsan sahabatnya Pak Menteri.

F-PDIP (M. R IHSAN YUHUS, BA., B.Comm. ME.Con.):

Terima kasih, Ketua.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati Bapak Menteri KKP beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati teman-teman dari RNI, PT Garam, dan PT Perikanan,

Yang pertama, mungkin saya ingin mengucapkan juga selamat ketemu lagi Pak Menteri karena memang betul kami sahabat lama tapi sesuai dengan prinsipnya Pak Ketua, Sudin, pernah bilang ke saya yang namanya sahabat kalau berjuang bersama, tapi kalau sudah enak masing-masing gitu. Jadi, kami dulu pernah berjuang bersama waktu kampanye dan setelah Pak Menteri jadi Menteri, jadi ini, jadi itu, saya nggak pernah hubungan lagi Ketua. *Wallahi, belum pernah hubungan.* Jadi sudah hampir 7 tahun baru hari ini ketemu, *Alhamdulillah* dipertemukan oleh di Senayan ini.

Baik, saya langsung saja ke permasalahan anggaran kita. Sangat disayangkan anggaran kita di rencana anggaran kita 2024 berkurang jauh. Tadi sudah dinyatakan atau sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa yang biasanya bisa sampai 12, 13 triliun sekarang hanya sekitar 6 triliun. Kami berharap ini bisa ditambah dan teman-teman di Banggar pasti bisa memperjuangkan *Insya Allah*. Nanti kita bahas Kembali, Pak Menteri.

Nah, yang kedua, ada satu hal yang dari pemaparan Pak Menteri tadi saya melihat ada yang menarik adalah masalah target dari 2024 itu ada satu yang berhubungan dengan produksi garam. Produksi garam di 2022 0,7, di 2023 2, dan target 2024 tidak berubah, padahal kami sudah melakukan FGD dengan kawan-kawan dari ID Food dan juga PT Garam, kurang lebih satu minggu lalu, bahwa mereka sangat optimis dalam permasalahan produksi garam. Contohnya dari Ebitda yang sudah naik dari angka 52 dan rencananya di 2023 ini RKAP nya 65 miliar dan ini sudah positif.

Kemudian juga melihat dari neraca garam kita yang masih banyak impor, tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Maka, sesungguhnya kebutuhan lokal dan impor itu adalah sebuah keniscayaan dalam mewujudkan kemandirian kita harus ditingkatkan.

Kemudian, juga ada masalah perintah Presiden dimana impor garam yang berhubungan dengan CAP yang sebesar 2,4 juta kurang lebih itu harus dihapuskan. Maka, tadi sudah disampaikan, Pak Ketua, memang uangnya ada apa *enggak* PT Garam? Tapi, kalau kemudian target kinerjanya tidak didukung oleh kementerian, saya rasa ini makin jadi *mission impossible* buat kita semua. *Nah*, ini mungkin jadi pertanyaan saya kenapa ditargetnya itu tidak berubah Pak dari 2... 2 juta mungkin maksudnya 2 juta ya kemudian jadi hanya 2 juta lagi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami juga melihat dari pemaparan, Pak Menteri, kurangnya anggaran ini akan diajukan lagi untuk beberapa hal yang menurut saya sangat bermanfaat dan sangat substansi gitu ya. Kalau dilihat dari usulan tambahan anggaran sebesar 714 miliar, itu ada beberapa poin yang Bapak sudah sampaikan. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan Kalaju dan juga Kawasan Kampung Perikanan Budidaya untuk gudang es. *Nah*, pertanyaan saya, Pak Menteri, apakah memang tambahan ini sifatnya sendiri atau digabungkan dengan yang sudah ada? Karena menurut kami dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya yang namanya bantuan, yang namanya anggaran untuk masyarakat, itu terkadang sifatnya tidak integral, tidak holistik. Jadi dibantu di hulu, hilirnya lepas, dibantu di hilir, hulunya lepas. Tapi kalau

masalah jalan tadi, Bu, saya mohon maaf memang agak beda kementeriannya jadi agak sulit, memang harus dilihat kondisinya. Dibantu eskavator tadi tapi ternyata jalannya rusak gitu, memang agak repot. Tapi, kalau kita lihat dari pengajuan Bapak ini, karena ada kemungkinan pengajuan tambahan ini bisa keputusannya bisa disetujui total semua atau sebagian. Maka, menurut saya programnya memang betul-betul harus ekstensifikasi atau pengembangan dari program yang sudah ada. Jangan kemudian satu program baru sama sekali dimasukkan ke dalam tambahan anggaran sehingga nanti ketika turun anggarannya setengah-setengah. Jadi *enggak* efektif, *enggak* maksimal lah istilahnya *enggak all out*. Ini Pak Menteri yang punya latar belakang pengusaha pasti paham betul kalau sudah masuk satu program itu kita *all out* dan pasti ada semacam tambahan atau persiapan kalau misalnya nanti ada tambahan biaya. Karena di sini saya lihat gudang beku pabrik es/*storage cold portable* untuk Kalaju dan Kampung Perikanan Budidaya tapi kemudian juga bantuan yang lain untuk Kalaju juga ada disini seperti eskavator dan lain sebagainya. Jadi, maksud saya bisa diterangkan kepada kami penambahan ini apakah nanti sudah disiapkan kalau misalnya parsial diberikan dan apakah bisa lebih baik ekstensifikasi atau memang berdiri sendiri.

Kemudian yang terakhir, tadi juga disampaikan juga oleh Pak Ansi panjang lebar tentang PP 26. Nanti saya juga ingin bertanya nanti, setuju Pak Ketua nanti perlu ada FGD tentang ini karena kita belum tahu isinya dan pengejawantahannya seperti apa.

Terima kasih, Ketua.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, Pak Sutrisno, 3 menit.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Assalamalaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera.

Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota,
Pak Menteri dan para pejabat Eselon I beserta jajaran,
Para Dirut BUMN mitra KKP,

Langsung pada persoalan Pak Menteri, menyikapi RKA 2024 menarik untuk disikapi bahwa target capaian sumbangsih Kementerian KKP terhadap pertumbuhan perekonomian nasional tahun 2024 ada 5 sampai 6%. Setelah ditelusuri, ternyata kondisinya ini produksi perikanan nanti di 2024 malah justru menurun dibandingkan target capaian 2023. 2023 3,34 juta ton tambahannya di 2024 hanya 2,63, padahal itu adalah variable utama untuk mengukur bagaimana pertumbuhan di sektor ekonomi itu. Begitu pula pada nilai ekspor, nilai ekspor juga di 2024 targetnya hanya USD 0,43 miliar kenaikannya

sedangkan di 2023 0,53. Kemudian, dari sisi masyarakat bagaimana manfaatnya pengaruh daripada peningkatan itu. Nilai tukar pembudidaya ikan 2024 kenaikan hanya 0,06 sedangkan 2023 naiknya 0,31. Variable-variable utama ini yang mempengaruhi peningkatan ekonomi justru 2024 menurun tapi target capaiannya 4, 5 sampai 6% sedangkan 2023 4%. Darimana ngitungnya ini? Jadi ada paradoks target capaian dan kenyataan yang ada malah justru menurun.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan kebijakan penangkapan terukur yang tentunya juga menyedot nilai anggaran yang cukup tinggi. Saya mencermati di RKA 2024, itu PNBPNya hanya sumber-sumber anggaran dari PNBPNya hanya 393 miliar dari totalitas 6,9 triliun anggaran di 2024 gitu. Saya hanya ingin tahu gimana ngitungnya ini? Di Kementerian LHK, sumber utama anggaran LHK itu adalah dari PNBPNya. Kita mendorong bahwa peningkatan apa namanya penertiban pengelolaan ikan di laut dalam rangka peningkatan PNBPNya akan lebih baik pula manakala sumber penerimaan PNBPNya itu menjadi sumber utama, menjadi anggaran bagi Kementerian KKP.

Yang terakhir, Pak Menteri, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, anggarannya meningkat dari 2022 350 miliar, 2023 363 miliar, dan 2024 654 miliar. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah yang menghasilkan PP 26 Tahun 2023. Pertanyaannya adalah seperti apa kondisi segmentasi yang terbangun di laut kita? Ada apa di dalam laut kita sehingga akhirnya terbit PP itu dan orientasinya oleh publik disikapi bagaimana mengeksplor pasir laut.

Saya rasa itu, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya, Pak Hermanto, tiga menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua, Pak Menteri bersama jajarannya,

Pertama, saya ingin menyampaikan arah kebijakan nasional RKP tahun 2024 ini setidaknya-tidaknya yang menjadi prioritas kita adalah pertama mengurangi kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dan yang kedua disini yaitu penguatan daya saing usaha. Dari dua arah kebijakan ini,

menurut saya ini sangat penting untuk diterjemahkan menjadi kebijakan KKP. Saya sangat setuju bila anggaran KKP ini 2024 dinaikkan yang sekarang ini pagu 6,9 triliun karena bila dikaitkan dengan yang dua arah kebijakan nasional tadi itu saya pikir kurang mendongkrak untuk meraih arahan tersebut, itu yang pertama.

Yang kedua, saya melihat usulan rancangan kegiatan prioritas KKP ini disini ada bantuan pemerintah, kemudian ada prioritas nasional. Jadi, saya melihat ada yang berulang *nih* Pak Menteri, apakah ini berulang ini berbeda atautkah sama. Misalnya bantuan pemerintah ada 165 promosi kampanye gemar ikan. Kemudian, muncul lagi di prioritas nasional 20 promosi kampanye gemar ikan. Jadi, ini poinnya berbeda ini hanya unit saja 165 promosi, kemudian di prioritas itu 20 promosi sementara jenis programnya ini sama. Apakah ini yang membedakannya ini apa? apakah karena bantuan pemerintah atau prioritas nasional.

Kemudian, ada lagi yang sama yaitu *chest freezer* di bantuan pemerintah itu ada 220 unit kemudian di prioritas nasional 300 unit. Kemudian juga peralatan pengolahan ikan demikian. Jadi, ada 3 poin yang sama tapi unitnya berbeda, jenis program sama. *Nah*, ini saya ingin mendengarkan penjelasan.

Nah, kemudian yang ketiga, Pak Menteri, saya mengusulkan kepada forum ini terkait dengan kampanye gemar ikan, bulan bakti nelayan, kemudian bulan mutu nelayan untuk 2024 ini, itu bisa direalisasikan di bulan Januari. Kira-kira begitu usulannya. Ini usul terserah kita nanti mau memutuskan apa kan? Gitu Pak Menteri. *Nah*, ini kan masih ada waktu untuk persiapannya kan?

Demikian, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Andi Akmal, tiga menit lebih cepat lebih baik.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta jajaran Eselon I, serta
Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Yang pertama, mengenai masalah anggaran, Pak Menteri ya, ini saya kira kita mengulangi lagi bahwa anggaran kita ini sangat kecil ya. Dilihat dari kebutuhan dan kontribusi KKP yang sudah terjadi selama ini, kita melihat sangat kecil dan Bapak hanya mengajukan tambahan 700 miliar ya. Ini saya

kira sangat kecil Pak Menteri, karena pagu indikatif merupakan baru ancar-ancar sebenarnya untuk menuju kepada pagu anggaran ya ataupun pagu alokasi anggaran. Kita berharap sebenarnya Pak Menteri ini usulan tambahannya bisa lebih besar dari 700, kalau bisa dicukupkan 1 triliun, Pak, tetapi diarahkan kepada program pemberdayaan masyarakat. Karena kalau kita lihat Pak Menteri, dari struktur anggaran Bapak ini, anggaran untuk program itu hanya 56%, Pak, hanya 3,7 triliun, kalau dari 6,9 ya, Pak. Untuk operasional Bapak ini 44% 2,9 triliun, Pak. Artinya, kita harus mendorong agar anggaran untuk program prioritas ini diperbesar Pak sehingga nanti presentasinya menjadi naik. Itu harapan pertama, Pak dan ini masih ada waktu Pak, Menteri Keuangan masih ada peluang dan juga di Banggar nanti tentu saya akan bicara juga bagaimana ada penambahan ya Pak ya. Itu yang pertama, Pak Menteri.

Yang kedua, anggaran rakyat, Pak. Kemarin kami FGD dengan PT Garam, ID Food. Kita ingin kontribusi dari KKP, Pak, apa *nih* untuk mendorong pengembangan daripada anggaran rakyat. Kita lihat ini anggaran Bapak ini kecil nih untuk garam, ini berarti tidak nyambung dengan upaya kita mengurangi impor garam, Pak. Kemudian, apa juga kebijakan dari KKP ini untuk mendorong pengembangan garam rakyat untuk peningkatan produktivitas dan kualitasnya, Pak. Ini perlu kita dengar *nih* sehingga nyambung antara keinginan di hilirnya PT Garam dengan di hulunya sebagai pembinanya. Walaupun kita tahu, Pak Menteri ya, walaupun rekomendasi impor sekarang kan bukan dari Bapak *nih*, dari Menteri Perindustrian tetapi tetap juga hulunya di Bapak. *Nah*, saya berharap juga nanti penambahan anggaran tambahkan lah anggaran untuk garam, Pak. Garam rakyat kita ini perlu dibantu sehingga betul-betul ada keberpihakan negara terhadap petambak garam ini Pak, ini yang kedua Pak Menteri ya.

Yang terakhir, ini mengenai masalah ekspor pasir. Saya kira tadi sudah banyak bicara ya Pak, saya ingin mencoba mendengar penjelasan, apa alasan ilmiahnya ini. Apa alasan masuk akal nya ini Pak? Yang kedua, apa nanti yang dilakukan oleh KKP untuk pengawasannya ini. Pak Menteri kan sudah bicara nanti ada pengawasan tapi kita belum dengarkan nih, apa pengawasannya Pak? Bisa *enggak* kita pastikan bahwa ini pasir ini tidak diselundupkan ke luar, gitu, Pak. Sekarang-sekarang ini tidak ada aturan yang membolehkan orang ekspor Pak, diam-diam ke Singapura kemana gitu ya. Ini menjadi pertanyaan besar public dan kita oleh DPR dan apa kira-kira, Pak, sehingga ini bisa dipahami oleh logika, Pak, bukan kepentingan apa di balik ini, loh. Apalagi ini mau Pemilu ini kan biasanya banyak kepentingan. Nah, ini perlu kita dengarkan nih, saya yakin KKP pasti harapannya tentu untuk kepentingan rakyat dan negara ya Pak. Tapi perlu jelaskan, Pak.

Saya kira demikian, Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Daniel Johan, yang terakhir Ibu Alien Mus, tiga menit-tiga menit biar cepat, dijawab, kesimpulan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E):

Ya, cepat saja.

Pimpinan, Anggota,
Pak Menteri, seluruh jajaran, dan seluruh Dirut,

Dua hal saja, Pak Menteri, yang pertama adalah saya baru melakukan pengawasan bersama PSDKP ke Pulau Lemukutan di Bengkayang. Pak Menteri, kasihan Pak Menterti, di sana nelayan banyak yang terpaksa meninggal karena kalau lagi darurat sakit mereka tidak punya pilihan untuk dari pulau menuju rumah sakit rujukan ya karena memang tidak ada sejenis kapal darurat yang memang bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat nelayan di sana. Jadi, mohon nanti Pak Menteri bisa memikirkan dan memberikan fasilitas kapal sehingga sangat membantu memastikan masyarakat nelayan disana tidak kesulitan pada saat terjadi darurat.

Yang kedua, Pak Menteri, ini sebagai tambahan mungkin belum ada yang memberikan perhatian menyangkut PSDKP juga. Di sini programnya itu yang ingin saya pertanyakan operasi kapal pengawas hanya 70 hari operasi. Berarti, 290 sekian hari apakah tidak ada pengawasan? Apakah itu kapal hanya berjalan 70 hari lalu aparat yang ada di sana terus menganggur kah di luar 70 hari termasuk hanya 50 hari operasi *speed boat* pengawas. Jadi, saya pernah pergi sama, Ketua, Pak Menteri, waktu itu di Batam dan miris kita bahkan Pak Ketua Waktu itu mengajak kita seluruh Anggota ngumpul duit buat mem-*back up* solar yang waktu itu pergi, kita bilang ini perjalanan kita terakhir, Pak. Saya piker, kenapa? Karena habis ini *enggak* ada solar ya, jadi. *Nah*, waktu itu kita bilang *wah* ini saat-saatnya kalau lagi *enggak* ada solar, penyelundup benur seluruhnya mestinya gampang tuh. Pada saat tidak kerja ya bekerja lah, ada musimnya begitu pengawas *enggak* usah jalan. Tapi di sini hanya 70 hari, kasihan sekali ya PSDKP. Berarti para pencuri illegal itu sangat gampang memanfaatkan waktu kosong itu. Jadi, mohon diberikan penjelasan Pak Menteri, apakah memang setelah itu kita kosong dari pengawasannya.

Demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terakhir, Ibu Alien Mus, Calon Gubernur Maluku Utara.

F-PG (ALIEN MUS):

Terima kasih, Ketua.

Kalau Ketua sama Pak Menteri sama Pak Sekjen dukung, pasti Insya Allah.

Baik, Pak Ketua, karena cuma dikasih 3 menit langsung saja, Pak Menteri, karena ini tahun 2024. Rancangan anggarannya saya masih melihat, masih mengikuti rancangan tahun 2023 tapi ingin sampaikan, Pak Ketua, seharusnya KKP juga memberikan kita laporan penyerapan KKP di tahun 2023 sehingga kita tahu Langkah konkret KKP ke depan sukses atau tidak.

Kemudian Pak Ketua, tentunya negara memberikan satu dukungan anggaran melihat penyerapan anggaran tersebut sampai saat ini waktu terakhir kami rapat bersama dengan Kementerian KKP dan juga Eselon I nya kami meminta apakah KKP sudah mengajukan permintaan pencabutan bintang di Keuangan karena mohon maaf Pak Menteri, kementerian lainnya sudah melakukan hal tersebut dan sudah dibuka bintang-bintang kejora itu, yang saya selalu ungkapkan itu. Apakah KKP tidak bisa melakukan itu? Karena saya melihat begitu pentingnya dukungan anggaran untuk Dirjen Daya Saing misalkan untuk Dirjen Budidaya misalkan, jangankan itu, kemarin kami meminta PSDKP diberikan dukungan anggaran karena waktu saya turun di Maluku Utara pada waktu reses, Pak Adin, saya telpon kan, Pak Adin? Terjadinya *illegal fishing* dan saya yakin percaya tapi *enggak* bisa melakukan pengawasan tersebut Pak Sekjen, karena memang *enggak* punya anggaran, karena pasti 360 hari masa layarnya hanya 70-80 hari, terus kapalnya hanya beberapa juga. Mohon maaf, pasti *illegal fishing* di Indonesia terus terjadi.

Kemudian Pak Menteri, kenapa saya harus terus mendorong bagaimana penyerapan dan penyerapan karena ini kan kasus covid sudah tidak ada seharusnya dukungan anggaran untuk KKP dinaikkan terus kebutuhan KKP yang dibintangi dan diprioritaskan programnya, seharusnya sudah jadi perhatian karena itu saya berharap setelah ini apalagi tadi Pak Menteri menyampaikan Karoren yang baru ya. Coba lebih ini lagi gitu maksudnya lebih aktif lagi untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang betul prioritas.

Kemudian 6,5 tentunya masih kecil dan saya tidak mau singgung lagi tentang ekspor pasir laut karena sudah disampaikan tapi saya mengingat bahwa Pak Menteri menyampaikan adanya perhatian khusus untuk daerah-daerah penghasil ikan.

Pak Menteri, selain dari itu Bapanas/Badan Pangan Nasional, kita meminta *report* kebutuhan perikanan atau konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa begitu? karena kita melihat angka *stunting* Indonesia itu masih tinggi sehingga kita berharap laporn-laporan yang dilaporkan oleh Bapanas benar-benar sudah terkonfirmasi atau satu data, *one way policy* lah.

Saya juga berbicara soal Kalaju, *alhamdulillah* sudah didatangi, sudah diverifikasi, tapi mungkin Kakak Ansi tadi salah menyampaikan, Pak Ketua. Verifikasinya saja semua sudah tapi untuk kegiatan realisasinya itu belum. Jadi, jangan ada kecemburuan diantara Ketua dan Pak Ansi lah. Cuma saya tadi agak sedikit cemburu, Pak Ketua, karena mungkin kah karena selalu diistilahkan NTT itu nanti tuan tolong, nanti Pak Trenggono tolong, kayaknya ini

juga banyak bantuan yang masuk ke NTT daripada ke Maluku. Padahal kita kayaknya lumbung ikan nasional walaupun *enggak* jadi tapi setidaknya didatangi lah. Jadi Ketua seperti itu karena saya melihat bahwa ada prioritas-prioritas anggaran untuk KKP yang harus benar-benar didukung tapi tetap ini masih sama seperti sebelumnya, masih pembagian proyek-proyek kecil seperti tahun 2023, tahun 2022, seperti kegiatan ini harus melihat evaluasi sesuai penyerapan per Dirjen.

Terus Pak Dirjen PRL, kami menyampaikan bahwa penekanan lokasi untuk yang di pasir laut itu, itu memang sangat luar biasa dan mungkin Bapak juga harus ada *study case* nya karena ini... ya, nanti tolong dijawab karena kita butuh jawaban yang pas.

Selanjutnya Pak Ketua, saya menunggu jawaban dari Pak Menteri.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh Anggota.

Silakan Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti yang spesifik secara detail baru nanti pada FGD. Tapi yang paling *hot* hari ini adalah masalah Kalaju yang sudah disurvei berkali-kali tapi belum juga mencapai titik temu. Ya, silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,

Cukup banyak pertanyaannya baik dari fraksi maupun kemudian ada pendalaman. Ada dua yang penting kalau menurut saya itu adalah soal Kalaju kemudian ini juga menjadi perhatian kami di kementerian dan kemudian soal PP 26. Pertanyaan yang lain saya kira akan kami sampaikan di dalam jawaban tertulis biar lebih detail. Tapi, soal Kalaju saja, saya ingin menyampaikan bahwa memang idealnya itu yang namanya kampung nelayan kan seluruh Indonesia. Jadi, kalau kita datangkan itu semuanya, itu memang butuh yang benar itu adalah tidak bisa sporadis satu-satu, begitu tidak bisa. Dia memang harus dari hulu-hilir. Jadi contoh di satu kampung ada prasyarat disitu harus ada dermaga, berapa jumlah nelayannya, lalu ada dermaganya, harus ada dok sekecil apapun harus ada dok, lalu kemudian ada pabrik es, lalu kemudian ada *cold storage*, lalu kemudian ada apa namanya SPBN dan seterusnya. Jadi, itu satu persyaratan-persyaratan.

Lalu, kalau kemudian itu kita penuhi dalam rangkaian minimal saja itu membutuhkan sekitar dana 21,5 miliar /21 juta miliar 500 juta kira-kira 22 miliar

lah satu kampung nelayan dengan hasil tadi kalau sudah berapa kali survei kesini kesono dan sebagainya. Itu yang kita ambil ada kurang lebih 1.200 nelayan lah kira-kira begitu. Yang kita pikirkan adalah satu pembangunan integrasi. *Nah*, kalau integrasi, kalau misalnya satu kampung nelayan itu adalah 22 miliar tadi, *enggak* cukup, Pak. *Nah*, gimana caranya ini? Caranya kita bikin model dulu, jadi kita bikin model nanti kita sampaikan kepada Menteri Bappenas, kita sampaikan kepada Menteri Keuangan. Harapannya dengan model itu kita akan sampaikan ketika *install* 22 miliar itu, hasilnya akan ada pertumbuhan berapa besar dan itu di-*run* oleh korporasi namanya koperasi. Kenapa begitu? karena nanti siapa yang *maintenance* dermaga itu, siapa yang *maintenance cold storagenya*? siapa yang harus menyediakan SPBN-nya? siapa yang harus menyediakan pabrik es nya dan lain sebagainya? *Nah*, ini lah yang kemudian kami mencoba merancang seluruh yang terkait. Jadi, ada Dirjen Tangkap sebagai inisiatornya, lalu kemudian ada dukungan dari daya saing. Kita minta daya saing bertanggung jawab terhadap penyediaan *cold storage-nya*, lalu kemudian pabrik es nya, lalu kemudian budidaya juga untuk ikut terlibat mana yang satu kampung itu tadi, Ketika mereka tidak bukan musim laut mereka bisa melakukan budidaya. Itu bentuknya *bioflok* dan lain sebagainya.

Nah, setelah kita hitung ya balik lagi, sama aja kan kalau *enggak* ada bensinnya *enggak* bisa, kalau survei gampang tinggal datang disurvei kemudian bolak-balik hanya memenuhi keinginan saja bahwa sudah disurvei. Saya bilang *enggak* bisa begitu, sekarang kita harus mikir, *nah* mohon izin kita bikin model dulu di 2023 ini yang harapan kami nanti di 2024 itu kemudian kita bisa *booster* gitu, bisa lebih besar dan lebih banyak lagi karena kampung nelayannya ini ribuan. Jadi kalau ini bisa di 2023 ini ada 10 kampung nelayan yang kita bisa jalankan, 10 ya, 10 atau 10 ya, ya 10 kita buat, nah itu terdiri dari berbagai Eselon I, anggarannya kita gabungin jadi satu, kita masuk situ. *Nah*, ini nanti yang kita akan minta kepada kita akan konsultasikan kepada Anggota Komisi IV. Tentu kalau 10 kan kampungnya pasti dimana-mana, banyak *enggak* kebagian semua, kan gitu. Tapi karena ini jadi model, kami mohon dukungan seperti halnya dengan pembangunan kawasan tambak udang yang berbasis kawasan itu. Kalau itu kita bagi misalnya, pasti tidak menjadi apa-apa. Seperti tadi Pak Ihsan mengatakan ya sporadis saja, kita bangun lalu kemudian nanti hilang lagi hilang lagi begitu. Tapi dengan model kawasan seperti tambak udang yang di Kebumen itu, itu bisa *sustain*, lalu harapannya itu kemudian bisa dalam waktu cepat juga bisa direplikasi. Bisa direplikasi ke daerah-daerah lain gitu.

Nah, kita sudah punya modelnya, kita sudah *proposed* ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan setuju untuk melakukan itu. Itulah kemudian terlahir salah satunya di Way Ngapu, mohon dukungannya Pak Ansi Lema dan Pak Edward tentu di sana bisa jalan. Karena kalau itu terjadi juga nanti itu akan terbangun lagi di wilayah lain lagi yang hasilnya bukan hanya kita survei tapi tentu itu sudah bisa memenuhi ekspektasi.

F-PG (ALIEN MUS):

Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS):

Pak Menteri, saya berterima kasih sekali ditampilkan layarnya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya belum selesai. Biar saya selesaikan dulu nanti.

F-PG (ALIEN MUS):

Oh, untuk Kalaju belum selesai?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Belum sedikit lagi.

F-PG (ALIEN MUS):

Oh, ok. Selesaikan, Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Mohon ditampilkan yang tadi presentasinya itu, gambarannya tadi yang kampung nelayan, Kalaju. Bisa ditampilkan? ya, *nah*. Jadi, ini harus ada pengelola, kita akan data seluruh nelayan yang ada di kampung itu, kita akan data *by name by address* disitu, lalu kemudian kita akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk kemudian akan kita hidupkan koperasinya. *Nah*, harapannya nanti sebetulnya ini satu contoh ada 1.200, 1.200 orang itu adalah satu kampung, dia kita jadikan anggota koperasi lalu nanti koperasinya itu manajemennya tentu bantuan dulu dari kementerian baik itu dari kita atau Kementerian Koperasi. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Koperasi. Nanti tujuannya adalah sampai anggota itu sendiri bisa memilih profesionalnya disitu yang kemudian mereka bisa menjalankan. *Nah*, inilah yang nanti kemudian akan kami diskusikan dengan Komisi IV prioritas model ini sebaiknya kita tentukan dimana dulu sebagai prioritas. Karena tidak mungkin membangun semua, jadi model ini jadi. Kalau dengan model ini jadi, harapan kami Bappenas lalu kemudian Menteri Keuangan bisa hadir dan melihat karena akan kami hitung berapa. Jadi, kalau kita hanya kasih bantuan alat tangkap misalnya begitu, malah *enggak* efektif alat tangkapnya *enggak* bisa apa-apa. Kalau kita kasih kapal ya kapalnya paling cuma berapa, tapi kalau sarana prasarannya kita siapin semua, itu kan harus ada yang *maintain*. Mungkin tahap pertama bisa jalan, tapi tahap berikutnya siapa yang jalan? *Nah*, itu lah korporasi, ini adalah sesuatu yang ideal dan membangun ini memang tidak seperti *bimsalabim* gitu, dibangun langsung jadi, *enggak* bisa, butuh *effort* banyak lah gitu. *Nah*, saya hanya berusaha semaksimal mungkin.

Nah, akibat dari ini sebetulnya saya punya pemikiran, kemarin kita juga pergi ke luar, ke luar negeri ke beberapa negara yang sudah maju, kita sudah ketinggalan jauh lah, Pak Ketua juga sempat ke sana. Dari produksi yang dilakukan oleh kampung-kampung nelayan ini tadi sebetulnya, itu banyak sekali yang bayangkan ya kalau *cold storage* yang besarnya cuma 10 ton saja, per ton nya biayanya hanya Rp5.000,00. Coba, itu kan sangat luar biasa dan itu salah satu yang akan kita *trial* begitu, nanti kemudian hasilnya ini bisa di-*collect* dan kemudian kita bisa bikin pasar ikan yang paling besar di situ yang ada *processing* dan sebagainya, nah ini ada contoh ada model di luar yang bisa seperti itu. Nah, bangun seperti ini memang tidak cepat tapi saya akan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada.

Nah, berikutnya adalah kalau tadi dikatakan bagaimana KKP ini secara maksimal berusaha untuk meningkatkan kinerja. Kinerja itu ada satu saja kontribusi yang paling langsung adalah bagaimana dia bisa memberikan kontribusi yang maksimal buat bangsa dan negara. Pasti itu dampaknya akan kepada rakyatnya, dalam hal ini adalah para nelayan dan yang lainnya. Nah, adalah potensi apa saja yang kemudian itu bisa dioptimalisasi atau di-*monetize* atau yang dikapitalisasi yang bisa menjadi pendapatan negara. Jadi, kalau *spending*-nya negara terhadap Kementerian Kelautan Perikanan, ini pemikiran kami kalau *spending*-nya adalah 6,7 kalau disetujui, kalau sebelumnya rata-rata adalah 6,2 triliun. Misalnya 6 triliun lah rata-rata begitu, tapi kemudian satu yang *direct* kontribusi itu bentuknya itu adalah PNBPNya bisa meningkat lebih dari APBN yang diberikan lalu kemudian yang kedua yang *indirect* adalah pertumbuhan, pertumbuhannya bisa meningkat maka baru itu kinerja kita dianggap baik. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita terus menerus karena kalau kita lihat produksi ikan kita itu 24,9 juta ton, 9 juta tonnya itu rumput laut. Kalau dibikin rata-rata 20.000 saja, itu hampir mencapai 500 triliun. Tapi, 500 triliun itu kalau Bapak-Ibu melihat berapa *tax* nya yang bisa didapat negara? cuma 2,6 triliun, ya *enggak* bener. Jadi artinya pada kemana ini. Saya kira para doktor bisa menganalisis itu lebih dalam lagi.

Yang kedua, kontribusi terhadap PDB. Kontribusi terhadap PDB cuma 2,54. Nah, kalau 500 triliun terus cuma 2,54 kayak apa *nih*? Ini salah satu yang sedang kita benahi dan *alhamdulillah* kan kemarin 2022, kita ada peningkatan yang signifikan di perikanan tangkap itu 100%, lebih dari 100% dari kalau kita ukur 2020 itu 600 miliar apa namanya PNBPNya, itu mencapai 1,2 triliun, artinya sudah 100% peningkatannya.

Lalu kemudian, PRL yang dari 25 miliar dia meningkat menjadi 385 miliar, ini sudah hampir berapa persen? Nah, tinggal nanti kita akan fokus ke budidaya salah satunya *modeling* seperti kawasan budidaya udang itu lah yang akan menjadi model yang ujungnya nanti akan berubah menjadi PNBPNya. Memang *enggak* bisa langsung kita hari ini bicara besok terjadi atau dalam waktu satu tahun. Wong yang membuat PP saja contoh penangkapan ikan terukur, itu 2 tahun saya baru bisa selesai. Nah, 2 tahun PP-nya jadi sampai hari ini peraturan teknis turunannya belum selesai. Saya sudah kejar-kejar terus sampai kemudian Dirjen yang baru ini menjanjikan akhir bulan ini sudah bisa selesai. Tapi, sekali lagi sebelum itu final, saya minta untuk dikonsultasikan dengan *partner* kerja kita yaitu Komisi IV. Nah, mungkin nanti

bentuk FGD-nya saya usulkan, Pak Ketua, izin barangkali model konsultasinya apakah di level tertentu atau secara keseluruhan, tapi yang pasti itu.

Lalu yang kedua, ada potensi lagi yang menjadi bahan pemikiran selama ini. Tadi Ibu Nur'aeni tadi mengatakan bahwa di Banten itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan reklamasi. Reklamasi bukan hanya di Banten, di seluruh Indonesia melakukan reklamasi. Sekarang izin reklamasinya itu akibat dari UndaUndang Cipta Kerja itu ada lewat kita juga *sih*, tapi kalau kemudian kita lihat itu tidak baik, tidak diizinkan. Sekarang ini numpuk banyak sekali pengajuan yang kemudian kita *drop*, banyak sekali di daerah Kepulauan Riau itu untuk kemudian pengajuan reklamasi. Yang menjadi pertanyaan adalah reklamasi yang sekarang ini, Bapak-Ibu tolong mohon dengan hormat, saya minta pergilah ke tempat reklamasi itu. Dari mana itu bahan untuk reklamasi? dari mana? pulau dihajar, kita tangkap di Rupert, kita *stop* itu di Rupert karena pulau itu yang disedot. *Enggak* bisa seperti ini, ini adalah merusak lingkungan. *Nah*, itu dulu mungkin yang terjadi gitu ya, mohon maaf. *Nah*, ini yang saya kira Bapak-Ibu semua musti harus keliling, ini kan *partner* kerja, mestinya kalau kita diserang dari luar bantuin lah, ya *enggak*? caranya harus datengin *tuh* yang reklamasi-reklamasi itu, yang dekat sama kita juga dilihat, bisa *kok*, ya kan? dari mana *nih* barang? Jangan-jangan satu pulau hilang, itu lah filosofi kemudian diterbitkannya, kami usulkan yang namanya OKE. Ternyata, menurut ilmuwan yang kita kumpulkan dari para pakar itu, Indonesia ini adalah tempat berputarnya arus, jadi akibat dari peristiwa oceanografi, itu lah terjadi perputaran arus yang terjadi pengumpulan sedimentasi.

Sedimentasi selain perputaran arus laut, juga terjadi di sungai akibatnya mungkin saja hutannya sudah *nggak* ada dan lain sebagainya, *enggak* bisa karena perkumpulan umat manusia nambah terus, sementara daya dukung alam kita ya segitu-segitu saja. *Nah*, kemudian yang kedua, protes lagi, itu muara sungainya begitu dangkal lalu kemudian pelabuhan-pelabuhan pada dangkal semua. Dalam hati saya, *aduh* memang kalau protes *doang* itu gampang, tapi coba pikirin diapain itu. Itu lah kemudian filosofi PP ini adalah salah satunya ini barang yang merusak lingkungan, karena kalau dia menutupi terumbu karang, menutupi padang lamun, ya itu sudah pasti merusak lingkungan. Ini lah yang kita ambil, kalau dibaca secara teliti Ibu Kiky, saya rasa sangat luar biasa kalau baca, saya punya keyakinan, tolong dibaca satu per satu setiap pasal. Di pasal itu dikatakan betul untuk menentukan apakah dia sedimentasi, harus ada tim kajian, dibentuk dulu. Kalau sekarang ditanya dimana itu sedimentasi? belum bisa kita katakan, saya dapat informasi berdasarkan informasi dari para pakar, itu ada di seluruh Indonesia. Bahkan Pak Khalid tadi mengatakan di Aceh itu banyak sekali, *nah* sekarang ini kita bentuk tim kajian. Siapa isinya? KKP sendiri, ESDM, KLHK ini unsurnya. Lalu, perguruan tinggi, hidrogafi, Pusidros sorry Pusidros, kemudian perhubungan, pemerintah daerah. Bayangin lembaga atau LSM yang mereka pegiat lingkungan, kumpul, saya tetapkan karena saya sebagai Menteri Kelautan, bekerjalah mereka. Hasilnya nanti akan dapat keluar kajiannya ini adalah sedimentasi tidak mengandung material yang berharga karena kalau ada material berharga misalnya dia pasir kuarsa atau dia ada kandungan timahnya atau ada kandungan toriumnya, *enggak* boleh.

Nah, kemudian yang kedua, begitu sudah ditentukan bahwa ini sedimentasi dan boleh diambil, alatnya. Alatnya itu *enggak* boleh sembarangan main sedot saja, itu *enggak* bisa, di dunia hanya tertentu karena mereka memahami betul bagaimana mengelola lingkungan laut. Ini jadi alatnya pun kita tentukan. Makanya di dalam PP itu kalau dibaca, alatnya pun harus disiapkan dengan alat-alat yang betul-betul bisa. Setelah itu, untuk apa itu? Saya bacakan disini, Pasal 9 itu mengatakan Pasal 9 mengatakan bahwa sedimentasi di laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk a. reklamasi di dalam negeri... didalam negeri, b. pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, c. pembangunan prasarana oleh pelaku usaha dan atau ekspor sepanjang kebutuhan.... sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi yang ribut adalah soal ekspornya padahal kalau... padahal kenapa? pada saat perencanaan diajukan untuk mau menggunakan sedimentasi untuk dimana, *enggak* ada, Pak, ya *enggak* dikasih. Saya mengajukan, Pak, untuk dimana? Untuk di Surabaya misalnya, luasannya berapa? 1.000 hektar, butuhnya berapa? sekian. Kita cek, oke, kita awasin ini, pergi ke sana, kamu bayar PNBPN, *alhamdulillah* jadi pendapatan negara begitu luar biasa. Saya membayangkan seluruh kebutuhan dalam negeri saja untuk reklamasi tidak kurang dari 20 miliar kubik *loh*, selama ini gratis *tis tis tis tis*. *Nah*, itu tujuannya kenapa? soalnya kalau saya minta anggaran terus melalui Banggar, Banggar itu sudah bekerja keras setengah mati juga tapi memang susah gitu *loh*. Nah, sekarang ini Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngasih banyak hal yang diberikan kepada kita itu, untuk bisa kita optimalisasi untuk bisa jadi pendapatan negara. *Kok enggak* boleh? *Nah*, itu aja. Jadi, saya kembalikan ke sana mohon maaf ya kalau misalnya... saya kira saya setuju dengan Ketua untuk ini kita bawa ke dalam FGD. Terus terang PP ini tidak akan bisa apa-apa, PP ini tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada peraturan turunan teknisnya.

Nah, peraturan turunan teknisnya ini lah yang saya harapkan di FGD itu juga ada masukan seperti apa cara pengawasan dan lain sebagainya bahkan di PP disebutkan harus ada petugas pengawas pemantau di dalam kapal itu untuk ngambil. Ini mohon maaf *nih* kalau sampai pertanyaannya kalau mereka semua kerja sama? *wallahu'alam* bisawab

KETUA RAPAT:

Kalau pengawasnya ada dalam tanda kutip gimana?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Gimana, Pak?

KETUA RAPAT:

Kalau petugas yang ada ngawasi tanda kutip bermain gimana?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Jadi saya bilang kalau misalnya semuanya berkolaborasi untuk kemudian bermain curang itu urusannya sama Allah.

KETUA RAPAT:

Ya, *enggak* bisa begitu *dong*, harus tegas.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Bukan-bukan, kalau dari sisi pengawasan kan pertama petugas pengawas. Yang kedua, kita punya teknologi satelit dan apa namanya *drone* yang kemudian kita akan lengkapi di tahun 2024 ini oleh PRL untuk bisa memantau semua.

KETUA RAPAT:

Kalau petugasnya yang ngawasin bermain-main, gimana?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Seminggu sekali ganti kata Pak.

INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi, Pimpinan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Seminggu sekali ganti. Tapi begini yang pasti gini kami berharap Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV juga pasti mewakili daerah, jadi saya kira juga bisa ikut terlibat di dalam pengawasan tersebut.

Demikian, Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih juga atas penjelasannya, hanya satu saja pertanyaan saya, Pak Menteri, karena ini PP sudah di-*launching* apakah kan PP ya, apakah masih terbuka ruang untuk perbaikan terkait PP ini ke depan apabila dirasa ada hal-hal yang secara ini kan kita bersaran saja,

bertukar pendapat, apabila ada perbaikan apakah mungkin PP ini diperbaiki demi masyarakat banyak terutama masyarakat pesisir.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya kira menurut Ketua, undang-undang saja bisa dikoreksi apalagi PP.

KETUA RAPAT:

Yang tidak bisa diubah itu Al-Quran, Alkitab. Selama itu dibuat oleh sama manusia boleh ya itu boleh, ya *toh*. Ini PP ini juga kan dikeluarkan *enggak* sembarangan dan tadi sudah diberikan peluang untuk kita mengawasinya ya kan. Jadi, masalah ini paling penting masalah Kalaju coba Dirjennya jawab ini. Ternyata tadi saya salah mengerti Ansi, saya pikir sudah selesai nyatanya belum juga. Dijawab kapan akan dieksekusi?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ketua, sedikit bisa, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Menteri, menyambung tadi, sini, Pak. Jadi nanti kita akan dalam setuju, Pak Ketua, terima kasih di FGD. Hanya ini titipan terkait dengan yang menjadikan kecurigaan kita, itu kan terkait dengan ada klausul di ayat berapa tadi, karena kami pegang juga, Pak, karena kami sebelum ngomong juga baca gitu ya. Itu kalau memang untuk kepentingan dalam negeri ya sudah, terkait dengan ayat yang di berapa tadi, itu dicoret saja apalagi itu katanya dan atau. Ini sebuah masukan tentunya dan nanti dalam FGD hitung-hitungan PNBP-nya seperti apa *sih*? Ini saya kira penting untuk kemudian kami membantu kalau meyakinkan gitu ya. Kami karena kenapa ragu-ragu? pengawasan masih lemah, Pak. Pengawasan masih lemah termasuk kenapa Pak Menteri duduk di situ, kan kasusnya PNBP juga, lah gitu sebelum Pak Menteri maksudnya. Jadi, kalau *enggak* ada itu juga Pak Menteri takdirnya *enggak* ada di situ. Nah, ini mungkin kemudian harus menjadi kajian penting.

Terima kasih, Pak Ketua.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Ya, satu menit.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Menteri, saya menyimak yang dijelaskan Pak Menteri lalu muncul pertanyaan apakah memang Pak Menteri dan KKP ini pertama ingin membereskan masalah sedimentasi yang menurut para ahli itu banyak terjadi di seluruh Indonesia ataukah pertanyaan kedua karena sedimentasi banyak, lalu kemudian kita sebagai negara ini bisa mengekspornya ke luar negeri?

Terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS):

Ketua, saya tadi kan mau bicara tapi belum dikasih kan.

KETUA RAPAT:

Bukannya sudah bicara?

F-PG (ALIEN MUS):

Belum yang kedua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan satu menit.

F-PG (ALIEN MUS):

Pak Menteri, karena sedimentasi sudah disinggung saya sangat mendukung sekali dengan kegiatan dan pola yang Pak Menteri paparkan tadi soal Kalaju. Memang percuma juga kalau memberikan satu kegiatan tapi tidak ada keberlangsungan dari kegiatan tersebut. 10 kampung nelayan maju, Pak Ketua, ini benar-benar harus menjadi *modeling* dan contoh dan harusnya keberlangsungan lebih jelas dan nyata. Pak Menteri, untuk penetapan lokus ini benar-benar harus tepat sasaran karena di situ Pak Menteri singgung soal SPBN, singgung juga soal dengan bagaimana dengan transportasinya, terus juga dengan Sarprasnya. Yang paling utama adalah Pak Menteri harus melihat dari bagaimana *sih* keberhasilan penangkapan ikan terukur di satu wilayah. Tentunya kita melihat bahwa harus ada zona-zona tertentu yang betul-betul diberikan *modeling* contoh Kalaju di provinsi saja karena kita juga *enggak* mungkin minta 54 atau 34 provinsi, *enggak* ada duitnya kan, Pak? Karena Bapak bilang 21 miliar, saya lihat disini anggarannya cuma 600, Pak. Ini 21 dibandingkan 600 juta ini terlalu jauh Pak, makanya contoh ini apakah benar-benar harus dijalankan di 2023. Kalau memang Bapak mau memberikan *modeling* yang pasti, kami Ikhlas saja, Pak, yang penting pasti, Pak. Kalau

memang 10 itu dikali 600 juta berarti sudah 60 miliar. 60 Miliar dibagi setidaknya 3 atau 4 Kalaju.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Bisa dimulai dari Maluku Utara.

F-PG (ALIEN MUS):

Ya kalau bisa seperti itu.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Satunya, satunya, 21 miliar, Bu Alien. Kalau 600 *enggak*.

F-PG (ALIEN MUS):

Iya, Pak. Ini kan Bapak kalau memang kita mau fokus, Bapak kan itu paling tinggi lebih kurang lebih 21 miliar.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Kita itu kan 10 model, jadi kira-kira kan 210 miliar.

F-PG (ALIEN MUS):

210 miliar, iya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Nah, sekarang kami akan konsultasikan ke Komisi IV, 10 itu dimana? Karena kan pasti semua banyak lebih dari 10, tapi ini jadi model dulu 10 nya.

F-PG (ALIEN MUS):

Iya, makanya, Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Buat mancing, buat mancing.

F-PG (ALIEN MUS):

Iya, Pak, itu memancing adrenalin, Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup ya?

F-PG (ALIEN MUS):

Pak Ketua, Pak Ketua, satu lagi, Pak. Jangan ngobrol.

KETUA RAPAT:

Ya, kan kesini dulu dong jangan langsung-langsung, dong.

F-PG (ALIEN MUS):

Iya, bener.

KETUA RAPAT:

Itu kan kayak ngobrol.

KETUA RAPAT:

Yang mengatur kan Ketua, baik, Ketua. Itu saja.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Ketua, saya setengah menit saja, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M):

Tadi Pak Menteri tadi belum menjelaskan sedikit tentang masalah garam Pak, tadi yang bertanya banyak tadi. Itu saja, Pak Ketua, minta sedikit tanggapan mengenai masalah garam.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Izin.

KETUA RAPAT:

Ya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ya, soal garam saya sempat pergi ke beberapa daerah, ya mohon maaf kalau kemudian pas ke NTT gitu.

KETUA RAPAT:

Kalau ke NTT, *enggak* mungkin ngajak Pak Ansi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Selalu ke NTT, NTB itu karena memang yang sudah ada di daerah situ. *Nah*, terus kemudian kami mencoba untuk melihat jadi yang menjadi kendala adalah ini lagi soal-soal, ini kan kalau diproduksi butuh waktu paling tidak satu tahun menyiapkan infrastruktur, satu tahun lebih lah menyiapkan infrastruktur kemudian diuji dan seterusnya. Juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi misalnya lahannya bisa jadi milik masyarakat kemudian dibuat menjadi satu koperasi misalnya gitu, terus kemudian pemerintah menyediakan anggaran, tapi dalam satu kawasan misalnya seperti itu. *Nah*, ini juga salah satu yang sedang kami hitung untuk kemudian berapa sebetulnya kemampuan produksi mau ditargetkan. Misalnya dua juta itu berapa ribu hektar luasan untuk pembangunan itu. Terus kemudian, ada kendala-kendala cuaca juga yang kita teliti seperti NTT itu kan sering adanya seroja misalnya begitu. *Nah*, kenapa begitu? karena berdasarkan survei, berdasarkan data, di wilayah sana itu yang tingkat panasnya itu yang paling panjang di atas 6 bulan yang kemudian madura. Madura itu kira-kira 5 sampai 6 bulan, selebihnya itu pendek-pendek panasnya sehingga produksinya tidak efektif. Itu salah satu.

Nah, kemudian yang berikutnya, memang garam ini memang ini harus ada kebijakan yang kalau boleh dibilang begini, Perpresnya memang sudah ada bahwa kita mau memproduksi ini di dalam negeri untuk seluruh kebutuhannya, itu di-produksi di dalam negeri atau kemudian dibandingkan dengan impor. Kalau dibandingkan dengan impor tidak akan pernah menang kita karena memang impor itu kan tambang masalahnya, mereka tinggal ngambil terus ngangkut pindahkan kesini.

Yang kedua, kalau kemudian di dalam rapat neraca itu, neraca garam misalnya, kan selalu industri itu kan yang mendapatkan alokasi impor juga, kalau saya *sih* mohon izin mengusulkan kenapa *enggak* PN Garam saja, PT Garam saja misalnya gitu. Karena kalau PT Garam sudah pasti produksi dalam negeri tapi kalau kemudian industri juga diizinkan, saya *sih* kurang begitu yakin kalau tidak bocor juga ke pasar umum. Ada satu contoh saja yang kami temui khususnya misalnya impor salem, sudah jelas bahwa itu dikhususkan untuk pemindangan, tapi banyak juga kita temukan itu untuk pasar luar. Jadi, terpaksa akhirnya saya minta Dirjen PSDKP untuk menindak begitu.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, cukup?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Saya kira begitu, Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau Pak Menteri mengatakan tadi diserahkan tadi ke PT Garam, saya *enggak* setuju.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Oh, siap, saya idealnya saja.

KETUA RAPAT:

Karena dulu salah satu penyelundupnya adalah PT Garam. Waktu itu langsung disegel sama Pak Fadel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Iya.
Izin, ketua, ini ideal.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalau diberikan kekuasaan tetapi gayanya tidak berdaya, uangnya *kagak* punya dan kemampuan SDM-nya tidak punya, ya sama juga. Itu malah memperpanjang mata rantai karena persoalan garam ini adalah persoalan transportasi dari daerah ke tempat wilayah-wilayah yang membutuhkan. Contoh, industri besar *tuh* hampir semua menggunakan garam dan terbanyak itu adalah di Pulau Jawa, pabrik kaca, pabrik pipa paralon, semua menggunakan garam. Cuma kalau kasih PT Garam sama saja memperpanjang regulasi ya, sebetulnya yang harus dikoreksi *tuh* apa? neraca garam dan Kementerian Perindustrian, ya kan? karena kan rekomendasinya salah satu dari sana ya *toh*. *Nah*, itu yang harus dievaluasi di sana harusnya. Jadi, Kalaju tolong dijawab kapan akan dieksekusi *nih* daripada teman-teman protes semua nih.

PLT. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP:

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri yang terhormat,

Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dari Pimpinan dan Anggota DPR Komisi IV atas terkait dengan kampung nelayan maju. Atas survei-survei yang telah dilakukan, kami sudah menetapkan 55 untuk dilaksanakan di tahun 2023 ini dan kami sudah koordinasi juga dengan teman-teman di tenaga ahli Pak Ketua, dan *InsyaAllah* dari 55 itu memang ada 10 diantaranya masuk ke dalam prioritas yang akan di-*booster*, seperti itu.

KETUA RAPAT:

Yang saya tanyakan kapan eksekusinya, eksekusinya kapan?

PLT. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP:

Sudah mulai sekarang, Pak, *purchase*, belanja dan segala macam sudah dijalankan.

KETUA RAPAT:

Sudah mulai?

PLT. DIRJEN PERIKANAN TANGKAP:

Ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, teman-teman tolong nanti kalau tidak ada *action* tolong infokan langsung ya. Ini baru Plt, jadi kalau nanti *enggak* jelas Plt-nya, kita cabut sekalian. Jangan Plt, betul kan Pak Menteri? Kalau memang betul Kalajunya berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat Plt nya kita buang, kita definitive, setuju?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Izin Ketua, yang 10 tadi tuh itu kan model. Kami mohon 10 ini kita konsultasikan ke Komisi IV melalui Pimpinan. Jadi, dimana sebaiknya karena untuk memenuhi semua pasti *enggak* mungkin.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Izin Pak Ketua, boleh?

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih.

Gini Pak Menteri, kalau pun anggarannya untuk 10, mohon itu secepatnya karena ini Kadesnya karena sudah disurvei, kan mungkin kalau Bapak *enggak* pernah berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat itu kalau masukin proposal padahal dia yang ngirim kita yang terima, yang ada di benak mereka ya cair aja Pak. Sama dengan yang desa ini, begitu sudah di survei apa yang di benak mereka sudah pasti. *Nah*, kalau kemudian info ini berlanjut apalagi sampai di akhir tahun *enggak* ada kejelasan, ini masalahnya tahun 2023, Pak, ini efeknya kesitu. Jadi mohon kalau pun hanya 10 dipilih, ini juga harus segera dan harus dipertimbangkan Pimpinan ada kompensasinya ini yang kemudian apakah bioflok, minimal ke desa itu, Pak. Ini mohon mungkin nanti menjadi bahan pertimbangan.

Terima kasih, Pak Menteri.

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi judulnya gini Pak Menteri, maksud Pak Slamet tadi proposal sudah dimasukkan, sudah disurvei, sudah apa, nanti kalau *enggak* dieksekusi dianggapnya Caleg memang tukang bohong, betul kan? Apalagi Ky?

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Ya, apa itu?

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Jadi di sini ini mau memastikan berarti kalau 10 saja, ini 55 nya bagaimana ya?

KETUA RAPAT:

Oh, 55 tetap jalan *dong*, tetap jalan.

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Mau mensinkronkan biar *enggak* salah persepsi.

KETUA RAPAT:

Betul, kan? Jawab pakai mic. Yang 55 tetap jalan *toh*?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Iya, yang 55 tetap jalan...

KETUA RAPAT:

Karena itu regular

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Karena sudah disurvei, Bu. Yang 10 *modelingnya* tadi.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup?

Terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dari dialog, diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV, sebelum acara ini kami akhiri akan kami bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini.

Silakan, Bu Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terutama yang sudah disurvei bolak-balik, Pak, ya. Karena bolak-balik Pak Menteri, sampai bingung juga *nih* kapan Pak Menteri. Apa maksudnya ini begini-begini, sahabat kok begitu.

Baik.

Kita bacakan draf kesimpulan:

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pagu indikatif belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/4/2023 tanggal 10 April 2023 sebesar Rp6.905.409.869.000,00 (enam triliun sembilan ratus lima miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp714.440.000.000,00 (tujuh ratus empat belas miliar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Para Anggota? Para Anggota? Belum makan siang

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

3. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka meningkatkan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 minimal sebesar 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengingat potensi yang harus dikelola dan diawasi sangat luas. Selanjutnya meminta Anggota Komisi IV DPR RI yang bertugas di Badan Anggaran DPR RI untuk dapat memonitor kenaikan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak Menteri setuju lah, orang naiknya besar sekali.

**RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan *focus group discussion* dengan Komisi IV DPR RI dengan melibatkan pakar, akademisi, *stakeholder* yang berkepentingan guna mencari solusi terbaik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut mengingat adanya polemik di masyarakat.

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Iya, setuju.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Istikharah duluan.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur kampung nelayan maju di

sentra kelautan dan perikanan karena infrastruktur Kalaju merupakan modal dasar ekonomi nelayan untuk tumbuh dan berkembang.

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri?

F-PDIP (DR. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H):

Pimpinan, sebentar... meningkatkan dan melaksanakan. Ditingkatin, *enggak* dilaksanakan ya sama aja menurut saya.

KETUA RAPAT:

Tadi kan sudah dijelaskan secara detail akan segera dieksekusi, ya *toh?*

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya ulangi.

5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur kampung nelayan maju (Kalaju) di sentra kelautan dan perikanan karena infrastruktur Kalaju merupakan modal dasar ekonomi nelayan untuk tumbuh dan berkembang.

Para Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Menteri?

F-PG (ALIEN MUS):

Ketua, mohon maaf ini cuma tambahan saja karena kan ini melaksanakan pembangunan infrastruktur dan juga saya berharap sarana dan

prasarana juga karena infrastruktur juga kan sesuai dengan yang model ditawarkan Pak Menteri kan sarana dan prasarana juga.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ini poinnya tentang Kalaju, apakah mau ditambahi dengan sarana prasarana? Pasti, memang ada kaitannya, itu poin yang berbeda atau kita konsentrasi di Kalaju.

KETUA RAPAT:

Coba, kalau di Kalaju *tuh* ada sarana prasarana *enggak*?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ada menu untuk dermaga, ada menu untuk fasilitas.

KETUA RAPAT:

Nah, itu kan sudah sarana prasarana di dalam Kalaju itu karena nilainya kan cuma 700 jutaan kan?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ya, Pak.

KETUA RAPAT:

Nah iya, mau sarana prasarana apalagi cuma 700 juta.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Sepuluh modelling maksudnya?

KETUA RAPAT:

Itu beda lagi, ini bicara kalaju yang reguler.

F-PG (ALIEN MUS, S.H):

Ketua, ini kan ada 65 lokasi ini pengembangan kampung nelayan maju 65. Kalau kesimpulan kita tidak berdasarkan apa yang disampaikan di sini, itu juga kan percuma, Pak. Lima puluh lima biasa, sepuluh yang luar biasa. Jadi, tentunya kita juga harus, jangan cuma hanya infrastruktur tapi juga kita butuh sarana dan prasarana sesuai dengan penyampaian *modelling* yang disampaikan Pak Menteri.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi, yang ini tetap. Nanti yang 10 ditambahkan lagi, ya. Itu aja kan? Karena kan tadi sudah dijelaskan 21 miliar itu semuanya, baik itu kalau nelayan tidak pergi ke laut, mereka bisa miara *bioflok* kan sudah jelas, sudah jelas sarana dan prasarananya.

Nomor 6 silakan, Bu Ketua, Nomor 5.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti masukan dan saran Anggota Komisi IV DPR RI dalam rapat kerja ini seperti program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat pelaksanaan FGD terkait Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Karantina Indonesia dan lain sebagainya.

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Ini kira-kira kalau kita jadikan satu FGD-nya dengan tiga kementerian bagaimana? karena ini kan menyangkut pertanian, dan kehutanan, serta kelautan, ya. Nanti masalah *cost* biayanya itu urusan pemerintah bertiga. Ya, setuju, ya?

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi garam rakyat dengan pendekatan integrasi lahan agar biaya operasional angkut dapat ditekan dan produksinya dapat bersaing dengan garam impor.

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pencemaran laut, importasi ikan yang merembes tidak sesuai dengan peruntukkan sebagaimana ketentuan yang berlaku, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan pengawasan terhadap pengusaha yang belum mempunyai izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan pelanggaran lainnya.

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ibu Ketua.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak Ketua, mohon izin secara substansi tadi sudah oke, 55 yang reguler yang 10 yang *modelling*, Pak. Tapi Pak Menteri, yang di halaman 15 ini ditulis pengembangan kampung nelayan maju 65 lokasi dengan anggaran 89 koma 500 miliar. Mungkin ini anggaran ini harus dipotong, Pak, karena hanya 55, yang sisanya itu bisa dialokasikan untuk yang *modelling* yang 10 itu, Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Izin, saya jawab.

Jadi dari yang dibuat oleh Dirjen Tangkap, maka ada 10 yang dipilih, itu kemudian PDS yang bagian menyediakan itu ditempelin ke situ tapi hanya 10 saja, 10 dari yang 55 itu. *Eh sorry*, 10 dari 65.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Pak, mohon maaf ini karena implikasinya ke anggaran *nih*, Pak, ada kompleksitas di sini, Pak. Kalau hanya 55 berarti yang harus ditulis ini 45 reguler 10 nya yang *modelling*, Pak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Jadi begini, Pak, izin Ketua.

Dari 65 itu, itu kan memang programnya Tangkap *as usual* yang sudah disurvei dan sebagainya. Dari yang 65 itu dipilih 10 yang mana, itu maka PDS nempel ke situ 10 saja. PDS yang tadinya dia ada program ditempelin kesitu.

KETUA RAPAT:

Jadi gini, yang 55 itu tetap cuma nanti di-*backup* oleh PDS, oleh siapa, oleh siapa menjadi 10.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ya, dari 65 yang di program itu kan jalan *nih*. Misalnya bantuan dia apa.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi dikeroyok lah oleh beberapa Eselon I.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Ada 10 yang dikeroyok, *nah* 10 ini saya minta dimana gitu loh maksudnya makanya *enggak* mengganggu.

F-PG (ALIEN MUS):

Izin Ketua, makanya tadi Pak Menteri, Pak Ketua, saya sampaikan di kesimpulan sebelumnya karena Bapak tadi kan sekilas sudah menerangkan *modelling* dari 10 itu. Disitu kan kita butuh Sarpras, butuh infrastruktur, itu lah kenapa saya tadi menyampaikan infrastruktur dan juga sarana prasarana untuk mendukung 10 tadi. 10 kegiatan tadi kan Bapak sudah kasih *modelling*-nya tadi itu butuh banyak, Pak, yang masuk di dalam situ. Itu lah yang menjadi catatan Komisi IV mendukung Bapak Menteri Kelautan yang terhormat.

Terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Izin Ketua, itu tadi kesimpulan dari Pimpinan kan ada di *statement* khusus, *enggak* apa-apa nomor 9, kita masukkan saja itu. Jadi lebih ada di-*stressing* gitu.

KETUA RAPAT:

Jadi, tetap dipisahkan yang reguler- reguler, yang ini beda lagi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Iya, jadi reguler ada tambahan-tambahan tapi hanya 10 gitu.

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi sarana dan prasarana di pembangunan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) di 10 (sepuluh) lokasi yang menjadi *modelling* Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Begitu ya bahasanya.

Para Anggota?
Pak Menteri?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Setuju.

KETUA RAPAT:

**RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M/WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Alhamdulillah.
Silakan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari dialog dan diskusi hari ini kita sudah putuskan tadi kesimpulan rapat kesepakatan antara Anggota Komisi IV DPR RI, Pimpinan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebelum kami mengakhiri rapat kerja ini, kami persilakan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup. Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya sangat senang sekali setiap Rapat Kerja dengan Komisi IV selalu tepat waktu, itu yang paling penting.

Terus kemudian yang kedua, banyak sekali masukan-masukan yang konstruktif yang menyebabkan kami semua secara bersama-sama selalu di kementerian untuk selalu berpikir bagaimana menerjemahkan dari apa yang menjadi keinginan seluruh Anggota yang ada di Komisi IV.

Saya mohon doa dan dukungan terus supaya ini bisa tetap kita bisa realisasikan dengan baik dan apa yang menjadi cita-cita kita.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Tepat waktu karena Menteri Trenggono sahabatnya Ihsan Yunus, bukan sahabatnya Pimpinan jadi beda.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV mohon maaf apabila selama kami memimpin ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan alhamdulillahirabi'alamin, rapat kerja hari ini, kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.45)
(KETUK PALU 3 KALI)**

a. n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002